

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wilayah pesisir dan lautan memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut serta memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya. Kekayaan laut tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dimanfaatkan secara bijaksana. Kebijakan pemerintah yang sektoral dan bias daratan menjadikan lautan sebagai tempat pembuangan sampah raksasa, dari sisi sosial ekonomi pemanfaatan kekayaan laut masih terbatas pada kelompok pengusaha besar dan pengusaha asing. Kekayaan sumber daya laut yang sangat melimpah menimbulkan daya tarik dari berbagai pihak dan instansi untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya dan untuk meregulasi pemanfaatannya.

Kendati tingginya akan permintaan ikan dan pemanfaatan wilayah pesisir tidak berarti harus mengeksploitasi sumber daya laut secara berlebihan, tetapi bagaimana dapat memanfaatkan sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Untuk itu, perlu memulai kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengelola sumberdaya perikanan kita secara berkelanjutan. Atas dasar tersebut melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2007 ditetapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 yang memuat pembangunan bidang kelautan dan menyelenggarakan Konferensi Kelautan Dunia atau *World Ocean Conference* (WOC) di Manado pada bulan Mei 2009. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 disebutkan bahwa berdasarkan kondisi bangsa Indonesia tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Pilar strategi pembangunan nasional yang digunakan untuk mencapai visi dan misi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 adalah pembangunan yang berkelanjutan dengan semangat *pro-poor, pro-growth, pro-job* dan *pro-environment*.

Wilayah lautan yang dewasa ini mejadi perhatian salah satunya adalah kawasan pesisir. Desa pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat permasalahan pokok , yakni **(1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir; (2) tingginya kerusakan sumber daya pesisir; (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan luntarnya nilai-nilai budaya lokal; dan (4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman**. Keempat permasalahan pokok ini juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang cukup tinggi pada desa-desa pesisir, terutama di wilayah pesisir pulau-pulau kecil.

Atas dasar realita permasalahan wilayah pesisir yang terjadi di Indonesia, pembangunan nasional bidang kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis ekosistem yang meliputi aspek-aspek sumberdaya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan dan teknologi. *Blue Economy* merupakan sebuah paradigma (konsep) baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya, lingkungan pesisir dan lautan. Jika pembangunan sektor kelautan dan perikanan diselaraskan dengan pendekatan *Blue Economy*, maka pembangunan industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan akan



berlangsung secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui *Blue Economy* merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berlebihan. Namun merupakan suatu lompatan besar dalam pembangunan dengan meninggalkan praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek serta menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Berlandaskan konsep *Blue Economy*, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuat kegiatan yang diharapkan mampu menjadi pemicu kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia yakni melalui kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

PDPT mempunyai makna strategis strategis yaitu pertama, wujud implementasi konkrit dari 11 prioritas nasional Kabinet Indonesia Bersatu II tahun 2011-2014. PDPT merupakan implementasi kebijakan presiden terkait peningkatan dan perluasan program pro-rakyat, kedua, PDPT merupakan wujud dari intervensi KKP dalam hal: (1) menata desa pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, (2) menghasilkan keluaran (output) yang dapat memberikan manfaat riil bagi masyarakat pesisir, dengan permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat, (3) pembelajaran bagi masyarakat pesisir untuk menemukan cara pemecahan masalah secara mandiri dan (4) mendorong masyarakat pesisir sebagai agen pembangunan. PDPT diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir. Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa pesisir tangguh dilaksanakan melalui tiga tahapan utama. Tahapan pertama, penyusunan perencanaan pengembangan desa yang antara lain disusun berdasarkan profil desa yang memiliki rentang waktu pelaksanaan lima tahun dengan uraian waktu tiap

tahunnya. Tahapan kedua, pelaksanaan program menghasilkan kegiatan fisik sesuai dengan rencana pengembangan desa di lokasi kegiatan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dan tahapan ketiga merupakan pelaksanaan program menghasilkan kemandirian dan keberlanjutan program oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).

Pengelolaan limbah sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Malang sudah sangat bagus (aspek ekologi). Buta huruf masyarakat sektor perikanan atau kawasan pesisir di kabupaten malang menurun tajam 2 tahun terakhir ini (variable sosial), usaha di wilayah pesisir kabupaten Malang banyak yang limbahnya berupa carbon (lingkungan), akses untuk kesehatan bagi masyarakat pesisir Kabupaten malang Selatan sangat mudah (aspek sosial), akses masyarakat yang menikmati program sosial seperti raskin, jamkesmas, beasiswa miskin, pinjaman kredit dan perumahan untuk masyarakat kelautan dan perikanan Malang Selatan sudah sangat tinggi.

Menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang Ir. Wahyu Hidayat, (2014) kepada *Malang Post* ada 3 desa yang memperoleh dana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Kabupaten Malang yaitu Desa Sidoasri, Desa Sitiarjo dan desa Tambakrejo, ketiganya berada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe). Pemerintah pusat melalui KKP sudah mengalokasikan bantuan PDPT tahun ini sebesar Rp.798 juta yang masing-masing diberikan tiga desa di Kabupaten Malang senilai Rp.266 juta.

Alasan penelitian yang berjudul **“Profil dan Rencana Aksi Masyarakat dalam Rangka Gerakan *Blue Economy* Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, Jawa Timur”** dilaksanakan di Desa Sitiarjo selain karena mendapatkan Dana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh berdasarkan Keputusan Menteri , Desa Sitiarjo merupakan desa dengan rawan bencana dan



perubahan iklim terbesar dibandingkan dengan desa Sidoasri dan desa Tambakrejo. Selain itu, Desa Sitarjo memiliki potensi ekonomi lokal unggulan diberbagai bidang atau komoditidan masyarakat desa Sitarjo juga memiliki motivasi yang besar untuk memperbaiki kehidupannya. Wilayah pesisir Desa Sitarjo mengalami degradasi lingkungan pesisir dikarenakan letaknya yang jauh dari pusat desa sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan pesisir di Desa Sitarjo.

### 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi :

- a. Bagaimana Profil Desa Sitarjo yang meliputi Kondisi Biogeofisik, kondisi sosial-budaya, kondisi ekonomi, infrastruktur, potensi sumber daya alam Desa Sitarjo terkait Pengembangan Desa Pesisir Tangguh?
- b. Apa masalah paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sitarjo terkait Pengembangan Desa Pesisir Tangguh?
- c. Apa saja rencana aksi masyarakat Desa Sitarjo terkait masalah yang mendesak Pengembangan Desa Pesisir Tangguh?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

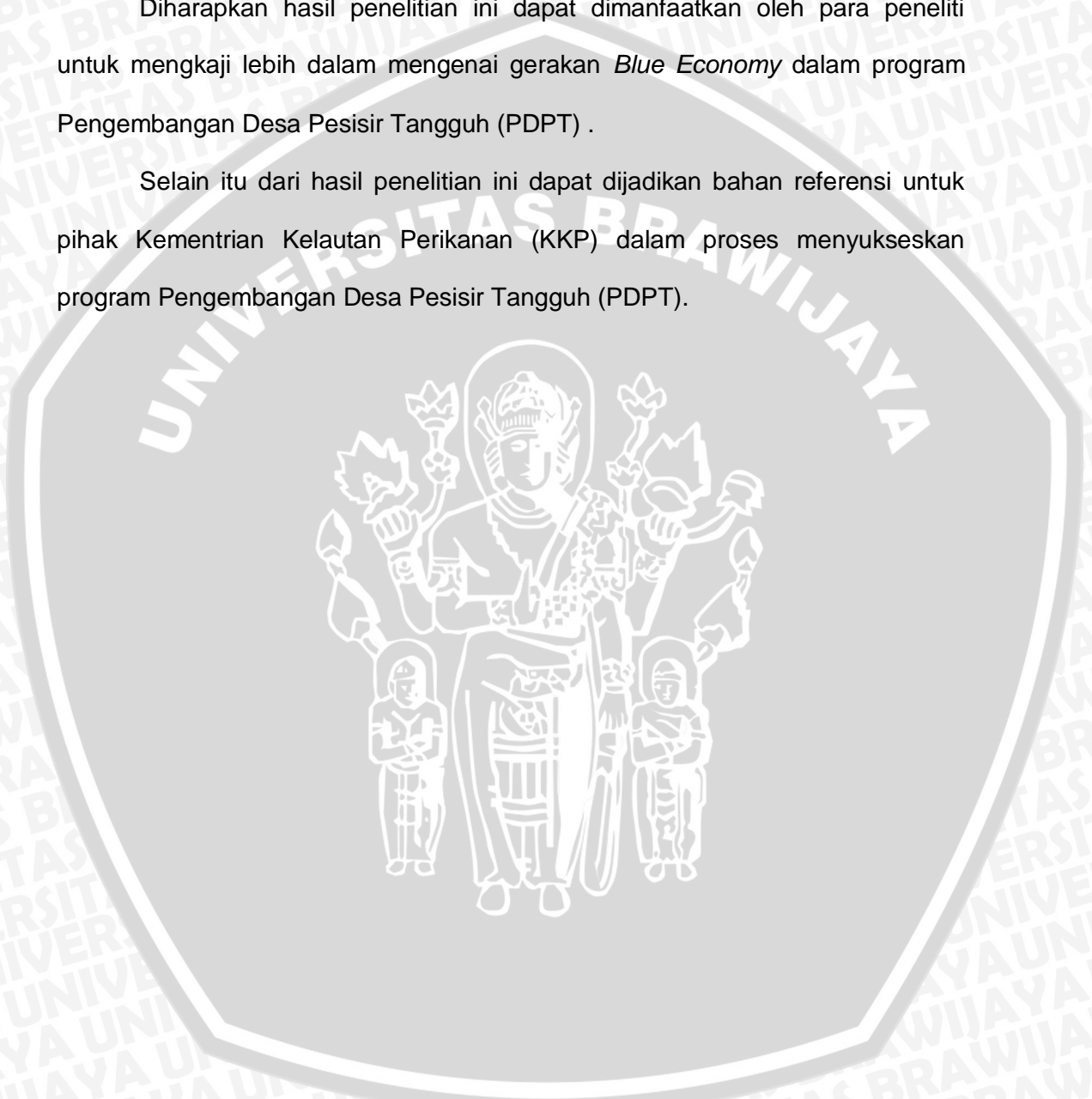
- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Profil Desa Sitarjo yang meliputi kondisi biogeofisik, kondisi sosial-budaya, kondisi ekonomi, infrastruktur dan potensi sumber daya alam Desa Sitarjo terkait Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.
- b. Untuk mengetahui dan memahami masalah paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Desa Sitarjo terkait Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

- c. Untuk menyusun rencana aksi masyarakat Desa Sitarjo terkait masalah yang mendesak Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai gerakan *Blue Economy* dalam program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) .

Selain itu dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk pihak Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dalam proses menyukseskan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).



## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Gerakan *Blue Economy*

Konferensi Rio 2012 atau Rio+20 adalah konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan. Konferensi tersebut sebagai tindak lanjut dari Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan atau KTT Bumi yang pernah diselenggarakan di kota yang sama pada tahun 1992 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB bekerja sama dengan Brazil di Rio de Janeiro pada tanggal 20-22 Juni 2012.

Konferensi ini memiliki tiga tujuan yaitu memperbarui komitmen politik atas pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi kesenjangan antara progress kemajuan dan implementasi dalam mencapai komitmen-komitmen lama yang telah disetujui serta mengatasi berbagai tantangan baru yang terus berkembang. Konferensi ini mempunyai dua tema yang telah disepakati oleh Negara-negara anggota, yaitu (1) ekonomi hijau dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pemberantasan kemiskinan, serta (2) kerangka kerja kelembagaan untuk pembangunan berkelanjutan. Sepanjang dan sesudah proses Rio+20 telah terjadi apresiasi yang berkembang bahwa lautan di dunia ini membutuhkan perhatian lebih mendalam dan tindakan yang terkoordinasi (Department of Economic and Social Affairs, 2014).

*Blue Economy* sebagai konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) saat ini telah menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Presiden RI bahkan telah menjadi pelopor dalam mempromosikan penerapan konsep-konsep pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai forum yang dihadiri. Oleh sebab itu Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) selaku inti di sektor kelautan dan perikanan harus berada di garis terdepan untuk mempromosikan dan



melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Selain KKP, masih banyak pihak yang berkepentingan dalam pembangunan yang tidak mengorbankan masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang tidak hanya untuk hari ini saja, tetapi juga harus menjadi warisan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Implementasi *Blue Economy* meliputi berbagai sektor yang cukup luas seperti perikanan tangkap dan budidaya, pembangunan Industri kelautan, wisata bahari, energi laut serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Sebagai implementasinya, KKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan diiringi produk yang memenuhi standar mutu pangan (*food safety*). Selain itu KKP juga menerapkan sertifikasi pembenihan dan pembudidayaan guna menghasilkan produk yang menganut jaminan mutu. Kemudian mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya serta mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.

## **2.2 Blue Economy**

### **2.2.1 Blue Economy menurut Gaunter Pauli**

Gaunter Pauli memperkenalkan suatu pendekatan baru yakni *Blue economy* melalui bukunya yang berjudul *The Blue Economy : 10 years, 100 innovations, and 100 million jobs* (Pauli, 2013). Konsep *Blue Economy* dimaksudkan untuk menantang para entrepreneur bahwa *Blue Economy Business Model* memberikan peluang untuk mengembangkan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, menggunakan sumber daya alam lebih efisien dan tidak merusak lingkungan, sistem produksi lebih efisien dan bersih, menghasilkan produk dan nilai ekonomi



lebih besar, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan memberikan kesempatan untuk memberikan benefit kepada setiap kontributor secara lebih adil.

Konsep *Blue Economy* dikembangkan untuk menjawab tantangan bahwa sistem ekonomi dunia cenderung mengeksploitasi dan merusak lingkungan. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya disebabkan oleh adanya limbah industri, akan tetapi kerusakan alam dan lingkungannya juga disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kapasitas atau daya dukung alam.

Dalam memaparkan hasil karya para ahli *Blue Economy* diberikan contoh nyata penemuan cara-cara menggunakan ilmu fisika, kimia dan biologi bersama material-material terbaru dan praktik yang berkelanjutan seperti dalam ekosistem. Kepunahan yang terjadi di dunia disebabkan karena model ekonomi dan perilaku manusia yang menilai rendahkan kontribusi spesies, habitat dan ekosistem hidup sebagai sistem penyokong kehidupan planet bumi dan manusia di dalamnya. Perkiraan tahun 2025, penduduk dunia mencapai 1,8 milyar manusia akan hidup di negara atau wilayah yang menderita kelangkaan. Oleh karena itu, inspirasi, inovasi yang dapat menjamin kehidupan manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang dituangkan dalam buku *Blue Economy* agar semua *stakeholders* yang membaca dapat mewujudkan cita-cita mulia untuk kemanfaatan semua manusia di bumi. Berikut beberapa penjelasan konsep *Blue Economy* dari tokoh-tokoh dalam buku Gaunter Pauli :

#### **a. Menurut Soichiro Honda**

Mengadopsi kesadaran baru yang tidak begitu sulit dan siap meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama serta siap menganut kebiasaan baru. Kebiasaan baru tersebut adalah industri *Blue Economy* sangat produktif yang mampu meningkatkan pekerjaan banyak orang. Kegiatan ekonomi ini didasari bagaimana alam memakai fisika dan biokimia untuk membangun sistem

keseluruhan yang bekerja dengan harmonis, mengalir dengan melimpah, berubah tanpa kesulitan dan berputar dengan efisien tanpa limbah atau hilangnya energi. Intinya perlu dikembangkan model yang regeneratif dan terus berputar serta membentuk tindakan praktis untuk memenuhi kebutuhan semua manusia secara optimal.

#### **b. Menurut Motanai**

Diawali dengan peribahasa Jepang, *Tidak membuang tetapi Juga Tidak Menginginkannya*. Kehidupan perlu keberlanjutan, maka memerlukan ekonomi yang penuh gairah. Kunci suksesnya adalah penerapan logika dalam ekosistem agar ekonomi tidak semakin lesu. Agar tidak semakin lesu, dapat dilakukan pengembangan ekonomi hasil inspirasi alam agar pemanfaatan sumberdaya alam dapat efisien. Sistem ekonomi yang terinspirasi dari ekosistem dapat bekerja dengan apa yang disediakan alam misalnya sumberdaya energi yang dapat diperbarui secara alami melalui hukum fisika. Perubahan sistem ekonomi berbasis ekosistem, akan memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menciptakan sistem ekonomi yang sesungguhnya. Sistem ekonomi demikian disebut *Blue Economy*, yaitu sistem ekonomi berlimpah ruah yang mampu memuaskan kebutuhan dasar semua orang dengan sumberdaya alam lokal. Model ekonomi yang sebaiknya diadopsi manusia yakni cara alam yang dapat mengubah kelangkaan sumberdaya menuju kebercukupan dan keberlimpahan.

*Blue Economy* adalah suatu sistem yang hanya tidak berefek positif bagi lingkungan tetapi juga bagi penghuninya seperti ketahanan pangan, kehidupan dan lapangan pekerjaan. Efek dari *Blue Economy* adalah dari kelangkaan menuju keberlimpahan.



### 2.2.2 *Blue Economy* menurut para ahli Indonesia

Beberapa sumber menguraikan terkait dengan ekonomi biru (*Blue Economy*) berhasil diperoleh dari berbagai media. Ekonomi biru adalah ekonomi yang merupakan model bisnis yang memberikan peluang untuk pengembangan investasi dan bisnis yang lebih menguntungkan secara ekonomi dan lingkungan, namun langit dan laut tetap biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menegaskan komitmennya dalam mengusung paradigma ekonomi biru (*Blue Economy*) yang diyakini mampu mengakselerasi industrialisasi kelautan dan perikanan sehingga sektor ini menjadi penggerak membangun ekonomi nasional.

*Blue Economy* merupakan sebuah paradigma (konsep) baru yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan, sekaligus menjamin kelestarian sumberdaya, lingkungan pesisir dan lautan. Jika pembangunan sektor kelautan dan perikanan diselaraskan dengan pendekatan *Blue Economy*, maka pembangunan industrialisasi di sektor kelautan dan perikanan akan berlangsung secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan industrialisasi kelautan dan perikanan melalui *Blue Economy* merupakan model pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan yang berlebihan. Namun merupakan suatu lompatan besar dalam pembangunan dengan meninggalkan praktek ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek serta menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Model pendekatan *Blue Economy* diharapkan mampu menjawab ketergantungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif akibat aktivitas ekonomi termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Keberhasilan dari industrialisasi kelautan dan perikanan membutuhkan konsep

*Blue Economy*, tenaga, aksi dan terobosan-terobosan seperti perbaikan rantai hulu hingga hilir, guna meningkatkan daya saing produk perikanan. Dibutuhkan hubungan yang sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta maupun masyarakat termasuk dunia pendidikan untuk menjalankan konsep *Blue Economy*. Dengan kata lain, daya saing harus dibangun berdasarkan atas keterpaduan. Program industrialisasi kelautan dan perikanan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan daya saing yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Setidaknya ada tujuh hal yang ingin dicapai dalam industrialisasi perikanan seperti peningkatan nilai tambah, peningkatan daya saing, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, penguatan pelaku industri perikanan, berbasis komoditas, wilayah dan sistem manajemen, berkelanjutan serta transformasi sosial. Maka dari itu guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, pemerintah melalui KKP memandang perlu untuk melakukan terobosan melalui program industrialisasi kelautan dan perikanan. Gagasan Indonesia tentang ekonomi biru (*Blue Economy*) terus menggelinding. Hampir semua anggota Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) menyambut dengan antusias, sehingga pemerintah Indonesia perlu segera membuat konsepnya dalam tatanan yang jelas. Dukungan Negara-negara berdatangan untuk mendukung sekaligus mematangkan konsep *Blue Economy*.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa esensi Konsep *Blue Economy* adalah :

a. Belajar dari Alam (*Learning from Nature*)

*Blue Economy* mencontoh cara kerja alam (ekosistem), bekerja sesuai dengan apa yang disediakan alam dengan efisien dan tidak mengurangi tapi justru memperkaya alam.



b. Logika Ekosistem (*The Logic of Ecosystems*)

Cara kerja ekosistem dijadikan model *Blue economy*, yaitu seperti air mengalir dari gunung membawa nutrisi dan energi untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan seluruh makhluk hidup dan tanaman, limbah dari yang satu menjadi makanan/sumber energi bagi yang lain, sehingga sistem kehidupan dalam ekosistem menjadi seimbang.

c. Terinspirasi oleh 100 inovasi (*Inspired by 100 Innovations*)

Secara empiris 100 inovasi ekonomi praktis telah dikembangkan dan membuktikan bahwa ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrisi dan energi tanpa meninggalkan limbah untuk mendayagunakan kemampuan seluruh kontributor dan memenuhi kebutuhan dasar bagi semuanya.

*Blue Economy* pada akhirnya akan menjamin bahwa suatu pembangunan yang dijalankan tidak hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin terjadinya keberlanjutan secara ekologi dan sosial. Secara umum *Blue Economy* dapat dipahami sebagai sebuah model ekonomi untuk mendorong pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan kerangka pikir seperti cara kerja ekosistem.

### 2.3 Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT)

Kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai potensi dampak kerusakan habitat, perubahan pada proses alami ekosistem dan pencemaran. Disisi lain, juga terjadi berbagai permasalahan seperti konflik kepentingan pembangunan, kelembagaan dan tingkatan pemerintah. Pembangunan yang tidak terintegrasi dengan baik tanpa pedoman dan mitigasi lingkungan yang tepat akan menghasilkan permasalahan dan

konflik. Oleh karena itu keterpaduan perlu dilakukan untuk mengompromikan kepentingan antar sektor, tingkatan pemerintahan, ruang darat dan laut, ilmu dan pengelolaan serta internasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka dipandang perlu adanya upaya mendorong pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam untuk melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan lingkup wilayah terkecil yaitu desa yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Desa Pesisir.

Berbagai program telah diluncurkan oleh pemerintah Indonesia di sektor kelautan dan perikanan sebagai bukti memelopori sikap mendukung *Blue Economy*. Salah satu program tersebut adalah program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Alasan mengapa diluncurkan kegiatan PDPT adalah banyaknya persoalan yang dihadapi daerah pesisir. Desa pesisir di Indonesia dihadapkan pada empat persoalan pokok, antara lain :

1. Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir
2. Tingginya kerusakan sumber daya pesisir
3. Rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan luntarnya nilai-nilai budaya lokal
4. Minim dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman

Keempat persoalan pokok tersebut juga memberikan andil terhadap tingginya tingkat kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang tinggi pada desa-desa pesisir.



Atas dasar realitas di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menginisiasi kegiatan yang diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan desa-desa pesisir di Indonesia yaitu Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Kegiatan PDPT ini merupakan salah satu bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh diharapkan mampu menjawab kendala sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya pesisir.

Penelitian yang dilakukan di salah satu desa yang mendapatkan dana PDPT ini mempunyai salah satu sasaran atau outputnya adalah berupa profil dan rencana aksi masyarakat desa Sitarjo dari hasil observasi, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD) sehingga menghasilkan rencana Pengembangan Desa Pesisir. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan secara *bottom up* sebagai masukan dalam hal profil dan rencana masyarakat desa Sitarjo. Secara umum penelitian yang dilakukan ini mendukung dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam pengembangan PDPT melalui Model PDPT yang tertuang dalam konsep Pengembangan Desa Pesisir Tangguh oleh KKP.

Model PDPT terdiri atas tiga bagian yaitu :

1. Rencana pengembangan desa pesisir
2. Penguatan kapasitas kelembagaan
3. Pencapaian *outcome* kegiatan PDPT

Untuk rencana pengembangan desa pesisir dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan *bottom up*. Pendekatan *bottom up* dimana penyusunan profil dan rencana masyarakat desa Sitarjo berdasarkan masukan masyarakat hasil *Focus General Discussion* (FGD) untuk menghasilkan rencana

pengembangan desa pesisir. Rencana pengembangan desa pesisir ini kemudian digunakan sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana detail kegiatan PDPT yang dapat meliputi aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial yang dijabarkan dalam lima fokus pengembangan kegiatan yaitu Bina Manusia, Bina, Bina Sumber Daya, Bina Lingkungan atau Infrastruktur dan Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim.

Program PDPT merupakan aksi yang menitik beratkan pada ketangguhan desa pesisir (*coastal resilient village*) dimana partisipasi komunitas desa pesisir sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Namun demikian peran pemerintah (pusat maupun daerah) sebagai fasilitator tidak dapat diabaikan sebagai faktor pendorong untuk mewujudkan desa pesisir yang tangguh.

Faktor pengembangan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Bina Manusia**, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun informal, memperluas dan meningkatkan kerja sama, memperbaiki budaya kerja, gotong royong, tanggung jawab, disiplin dan hemat serta menghilangkan sifat negatif boros dan konsumtif.
2. **Bina Usaha**, yaitu kegiatan yang mencakup peningkatan ketrampilan usaha, perluasan mata pencaharian alternatif, pengelolaan bisnis skala kecil dan penguasaan teknologi. Selain itu, program ini meningkatkan dan mempermudah akses terhadap sumberdaya, teknologi, modal, pasar dan terbangun kemitraan dengan pelaku usaha dan terbangunnya sistem insentif administrasi serta pendanaan secara formal dan informal.
3. **Bina Sumber Daya**, yaitu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memperkuat kearifan lokal dalam pengelolaan sumber dayaa, revitalisasi hak



ulayat dan hak masyarakat lokal, penerapan *monitoring, controlling and surveillance* (pengawasan) dengan prinsip partisipasi masyarakat lokal, penerapan teknologi ramah lingkungan, mendorong pengembangan teknologi asli, merehabilitasi habitat, konservasi dan memperkaya sumber daya.

4. **Bina Lingkungan atau Infrastruktur**, yaitu kegiatan yang mencakup pembangunan infrastruktur, rehabilitasi vegetasi pantai dan pengendalian pencemaran melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan secara spasial dalam rangka mendorong peningkatan peran masyarakat pesisir dalam penataan dan pengelolaan lingkungan sekitarnya.
5. **Bina siaga bencana atau perubahan iklim**, yaitu kegiatan yang mencakup usaha-usaha pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim, rencana aksi dalam pengurangan resiko bencana, penyadaran masyarakat, gladi/latihan secara reguler, memudahkan akses data dan informasi bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pembangunan sarana dan prasarana penanggulangan bencana ( antara lain jalur evakuasi, shelter, struktur pelindung terhadap bencana, fasilitas kesehatan, dan cadangan strategis desa) yang menekankan pada partisipasi dan keswadayaan dari kelompok-kelompok sosial yang terdapat pada masyarakat/komunitas pesisir.

Dari beberapa aspek yang telah disebutkan di atas, pada prinsipnya muatan PDPT lebih menekankan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan, pembangunan lingkungan dan infrastruktur, sumber daya serta kemandirian ekonomi yang diharapkan dapat mampu meningkatkan ketangguhan dengan meminimalkan dampak kerugian akibat bencana dan perubahan iklim di desa-desa pesisir.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur pada bulan Februari 2015 sampai Maret 2015

#### 3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono , (2012) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pada penelitian ini digunakan beberapa metode dalam mencapai tujuan penelitian yakni menggunakan metode *Enabling Community Action* (ENACT) Model dan Metode *Urgency, Seriousness and Growth* (USG).

##### 3.2.1 *Enabling Community Action* (ENACT) Model

*Enabling Community Action* (ENACT) Model merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk memahami apa yang dilakukan oleh suatu komunitas secara partisipatif untuk menghasilkan Rencana Aksi Masyarakat. Komunitas dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang yang mendapatkan dana Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

Kita perlu memahami komunitas dengan cara menggali sebanyak mungkin informasi tentang kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini dilakukan agar bisa mengetahui apa saja kegiatan yang sungguh-sungguh dibutuhkan untuk membangun komunitas yang mendukung Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) serta agar bisa mengetahui seberapa besar ketertarikan komunitas terhadap kegiatan Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang sedang dilaksanakan.



Cara-cara yang diperlukan untuk memahami komunitas sekaligus mengungkapkan kebutuhan-kebutuhannya. Ada 6 tahapan untuk memahami, mengungkapkan kebutuhan komunitas dan membuat aksi, yaitu :

1. Batasan mengenai komunitas
2. Informasi yang harus dikumpulkan untuk memahami komunitas
3. Sumber-sumber informasi tentang komunitas dan siapa saja yang menjadi sumber informasi.
4. Mobilisasi komunitas sebagai titik pangkal kegiatan
5. Cara-cara untuk menggerakkan masyarakat guna mengenali kebutuhan
6. Pembuatan rencana aksi masyarakat

#### *-Batasan Komunitas*

Komunitas adalah sekelompok orang yang berdiam di suatu tempat tertentu. Secara umum praktik sosialnya terikat oleh nilai-nilai dan tradisi yang sama sehingga memiliki gaya hidup yang sama. Dalam penelitian ini, komunitasnya adalah masyarakat pesisir Desa Sitarjo yang terdiri dari seluruh profesi dan berbagai bidang yakni pemerintahan, kemasyarakatan, pendidikan dan keuangan.

Sebelum memulai penelitian perlu untuk mengenali dan memahami diri sendiri dan komunitas. Kebutuhan untuk mengetahui budaya dan tradisi komunitas, sumberdaya yang terkandung, infrastruktur yang ada, status sosial dan ekonomi warga serta kebutuhan dan keinginannya sangat diperlukan. Keseluruhan informasi yang diperoleh merupakan bagian penting untuk merancang rencana kegiatan atau program.

#### *-Informasi Untuk Memahami Komunitas*

Informasi dasar sangat diperlukan untuk mengetahui komunitas desa pesisir di Desa Sitarjo sebagai model Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

Informasi pertama yang akan digali adalah gambaran desa model sebagai Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dapat ditentukan beberapa masalah dasar dalam Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Desa Sitiarjo yaitu :

- a. Mengidentifikasi stakeholder utama dan kepentingannya di Desa Sitiarjo
- b. Menguraikan potensi dan kondisi sumberdaya dan lingkungan pesisir di Desa Sitiarjo
- c. Mengkaji masalah-masalah pesisir dan kelembagaan di Desa Sitiarjo
- d. Mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara kegiatan manusia, proses alamiah dan kerusakan sumber daya pesisir
- e. Memilih isu-isu penting yang akan mejadi fokus utama pengelolaan di Desa Sitiarjo
- f. Merumuskan dan menyusun tujuan pengelolaan pesisir

#### *-Sumber-Sumber Informasi*

Informasi awal diperoleh dari dokumen-dokumen adalah informasi dari tangan kedua. Artinya tidak dikumpulkan langsung oleh penggerak komunitas melainkan hasil rangkuman dari data yang dikumpulkan oleh orang lain sebelumnya. Sumber informasi awal ini dapat dikatakan sebagai data sekunder. Sumber informasi tentang komunitas didapatkan dengan cara mengumpulkan informasi yang kita butuhkan dari sumber-sumber seperti :

- a. Laporan monografi desa atau dari dinas-dinas pemerintah
- b. Laporan LSM atau organisasi sukarela lain
- c. Berita Koran, majalah, situs online dan lainnya

Meski informasi yang berasal dari dokumen sangat bermanfaat untuk mendapatkan gambaran dari komunitas sasaran program tetapi informasi yang didapatkan tidak bisa mencakup semua hal yang menjadi perhatian dan tujuan



kita. Oleh sebab itu, kita perlu mengumpulkan informasi secara langsung dari komunitas yang akan dijelaskan di bagian metode mobilisasi.

Informasi langsung dari warga komunitas sasaran program yang ada di Desa Sitarjo merupakan informasi terbaik yang akan didapat. Terdapat beberapa orang yang dapat membantu dalam mengumpulkan informasi yang kita butuhkan yakni :

- a. Aparat pemerintah Desa
- b. Pemimpin agama Desa
- c. Anggota organisasi kepemudaan Desa
- d. Anggota organisasi perempuan Desa
- e. Orang yang "dituakan" di Desa

Selain memperoleh informasi dari individu-individu di atas, peneliti juga bisa bertanya secara informal di tempat-tempat publik seperti warung, tempat ibadah, pos ronda, dan lain-lainnya. Sumber informasi yang diperoleh dengan bertanya secara langsung ini disebut data primer.

#### *-Persiapan Mobilisasi dan Peta Kekuatan*

Kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti adalah pengenalan program kepada komunitas masyarakat desa. Kegiatan ini adalah bagian paling penting untuk mendapatkan informasi dari masyarakat desa. Program yang dikenalkan meliputi pengertian dari Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Setelah menjelaskan tentang gambaran program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh ada beberapa langkah yang harus dilakukan selanjutnya, yaitu :

- a. Pengumpulan informasi
- b. Menetapkan masalah, potensi desa dan jawaban persoalan

Setelah kegiatan pengenalan program dan menyampaikan rencana kegiatan, tahap selanjutnya adalah membuat peta kekuatan. Bersama dengan masyarakat narasumber, kita menentukan siapa saja orang atau lembaga yang

diduga memiliki pengaruh kuat di Desa Sitarjo baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung jalannya program. Selain orang yang memiliki pengaruh, juga perlu didefinisikan mereka yang mempunyai kekuatan pendorong.

Melalui peta kekuatan ini, gambaran awal dari orang atau lembaga yang memiliki pengaruh di Desa Sitarjo untuk mengambil keputusan dan mendukung kegiatan yang direncanakan akan diperoleh. Di sisi lain, akan diketahui juga orang atau lembaga yang akan memberikan hambatan dalam kegiatan yang direncanakan.

#### A. Menetapkan kebutuhan secara partisipatif

Adapun sejumlah metode yang digunakan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama komunitas untuk menetapkan masalah dan kebutuhannya. Salah satu diantaranya adalah *Focus Group Discussion* (FGD). Secara khusus, FGD adalah pendekatan partisipatif dengan titik tekan pengetahuan lokal. Pendekatan ini memungkinkan warga komunitas untuk secara mandiri melakukan analisis dan perencanaan pembangunan. Ada banyak variasi dalam FGD yang digunakan sesuai dengan kondisi komunitas lokal. Dua teknik yang akan dipakai adalah peta potensial dan *preference ranking*.

##### 1. Pemetaan Komunitas

Diharapkan setelah mendengarkan berbagai informasi kunci didapatkan :

- Orang yang berkaitan dengan PDPT
- Tempat-tempat penting bagi kegiatan PDPT
- Kronologi atau sejarah mata pencaharian yang utama

Peneliti bersama warga menyusun kembali dalam peta potensial dengan memanfaatkan material yang tersedia komunitas. Peta tersebut kemudian menjadi dasar diskusi untuk mengenali sumberdaya dan membuat rencana aksi sesuai dengan kebutuhan komunitas dengan membuat *mapping* desa.



Selain peta potensial, diagram Venn dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kedekatan masyarakat terhadap lembaga atau komunitas yang ada di Desa terkait penyampaian program PDPT. Untuk membedakan lembaga atau komunitas mana yang paling dekat terhadap masyarakat desa dibuat lingkaran dengan jarak yang lebih dekat dengan pusat lingkaran Desa. Dari diagram Venn tersebut dapat menunjukkan lembaga-lembaga yang memiliki potensi untuk berperan dalam mendukung PDPT dan lembaga lain yang belum mendukung.

## 2. Preference Ranking

Selain pemetaan sosial, masing-masing partisipan atau narasumber bisa menuliskan rincian masalah dalam selembar kertas kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategori. Hasilnya kemudian diurutkan dan didiskusikan oleh para partisipan. Hasil akhir dari urutan hasil diskusi tersebut menggambarkan prioritas yang dipilih oleh partisipan.

### B. Menentukan kebutuhan untuk perencanaan

Setelah semua informasi yang dibutuhkan terkumpul, hasilnya kemudian disusun secara sistematis untuk dimanfaatkan dalam membuat perencanaan. Setelah itu, hasil ini disampaikan kepada perwakilan warga apakah temuan tersebut sesuai dengan situasi komunitas. Pertemuan ini adalah ajang bagi para warga untuk mengetahui secara lebih masalah yang berkembang di desa Sitarjo.

Apabila warga tidak keberatan dengan hasil temuan yang dipaparkan, maka selanjutnya adalah memilih masalah utama untuk usulan pembuatan rencana aksi. Narasumber dalam pertemuan tersebut memilih isu utama dan kegiatan untuk dikembangkan dalam rencana aksi.

### -Mengembangkan rencana Aksi

Setelah melakukan analisis atas informasi yang mampu kita kumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah memikirkan bagaimana memanfaatkan untuk

membuat perencanaan. Responden diharapkan mampu membuat jalan keluar dari masalah yang dihadapi warga komunitas.

Berdasarkan kebutuhan komunitas yang sudah dikenali, komunitas mampu menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dirancang. Rencana aksi semacam ini merupakan inti dari kegiatan apa saja yang harus dilakukan, menentukan orang yang bertanggung jawab, sumberdaya yang dibutuhkan serta kerangka waktu yang dibutuhkan.

### 3.2.2 Metode *Urgency, Seriousness and Growth* (USG)

Penetapan prioritas masalah menjadi bagian penting dalam proses pembuatan rencana aksi. Hal ini dikarenakan terbatasnya sumber daya yang tersedia dan tidak mungkin menyelesaikan semua masalah dalam waktu dekat. Selain itu adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya sehingga tidak perlu semua masalah diselesaikan (Azwar, 1996).

Untuk lebih mudah menganalisis permasalahan yang menjadi prioritas, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Diantara metode tersebut adalah metode *Urgency, Seriousness and Growth* (USG).

Menurut Kepner dan Tergaue (1981) menyatakan pentingnya suatu masalah dibandingkan masalah lainnya dapat dilihat dari tiga aspek berikut :

1. Bagaimana gawatnya masalah dilihat dari pengaruhnya sekarang ini terhadap produktivitas, orang dan atau sumber dana dan daya?
2. Bagaimana mendesaknya dilihat dari waktu yang tersedia?
3. Bagaimanakah perkiraan yang terbaik mengenai kemungkinan berkembangnya masalah?

Pada penggunaan Metode USG untuk menentukan suatu masalah yang prioritas terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan. Ketiga faktor tersebut adalah *urgency, seriousness dan growth*. *Urgency* berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin



mendesak suatu masalah untuk diselesaikan maka semakin tinggi urgensi masalah tersebut. *Seriousness* berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian bagi organisasi seperti dampaknya terhadap produktivitas, keselamatan jiwa manusia, sumber daya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak masalah tersebut terhadap organisasi maka semakin serius masalah tersebut. *Growth* berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Suatu masalah yang cepat berkembang tentunya makin prioritas untuk diatasi permasalahan tersebut. Untuk mengurangi tingkat subyektivitas dalam menentukan masalah prioritas, maka perlu menetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor skala 1-5. Semakin tinggi urgensi, serius atau pertumbuhan masalah tersebut maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut.

Metode USG ini digunakan untuk menentukan masalah mendesak atau prioritas yang ada di Desa Sitarjo. Peneliti bersama masyarakat Desa Sitarjo melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dimana warga Sitarjo yang terlibat adalah dari seluruh profesi pekerjaan dan perwakilan dari semua komunitas atau lembaga yang ada di Desa Sitarjo. Masyarakat akan bermusyawarah sampai kata mufakat mengenai masalah apa yang menjadi prioritas di Desa Sitarjo dengan memberikan skor pada setiap masalah yang ada. Masalah dengan skor tertinggi merupakan masalah mendesak yang ada di Desa Sitarjo.

### 3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk

menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penyajian data, menganalisis data dan menginterpretasikan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi tetapi lebih menekankan kedalaman informasi sehingga sampai pada tingkat makna. Makna yang dimaksud adalah dibalik yang tampak (Sugiyono, 2012).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkontek khusus. Pengetian ini hanya mempersoalkan dua aspek yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistic sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam suatu kontek khusus. Penelitian didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata dan gambaran holistik (Moloeng, 2010)

Pada penelitian yang berjudul **“Profil dan Rencana Aksi Masyarakat dalam Rangka Gerakan *Blue Economy* Pengembangan Desa Pesisir tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang”** akan berusaha menuturkan permasalahan yang ada di dalamnya. Pencarian data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode ENACT Model (pendekatan komunitas) dan pendekatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan warga maupun komunitas yang ada di Desa Sitarjo. FGD merupakan suatu proses pengumpulan informasi dari suatu permasalahan melalui diskusi kelompok yang dalam proses pengumpulan informasinya bukan melalui wawancara yang ditujukan pada perorangan. Dimana semua hal tersebut sesuai dengan konsep teori penelitian kualitatif.



### 3.4 Populasi

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut dapat di rumah berikut keluarga dan aktivitasnya, atau orang-orang di sudut-sudut jalan yang sedang ngobrol atau ditempat kerja, di kota, desa atau wilayah suatu Negara. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui “apa yang terjadi” di dalamnya. Pada situasi aktivitas, orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa situasi sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah situasi sosial yang ada di Desa Sitarjo.

### 3.5 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik *sampling* adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan. Teknik *sampling* pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *Probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling* (Sugiyono, 2012).

Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang dijadikan sebagai responden dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Hasil penelitian tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak diambil secara random. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau diterapkan ke situasi sosial (tempat

lain) apabila situasi tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi yang sudah diteliti.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengambilan sampel secara *purposive sampling*. Peneliti akan memilih responden yang akan memberikan data dengan pertimbangan tertentu seperti memilih responden yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan atau mungkin dianggap sebagai penguasa atau orang yang berpengaruh di tempat penelitian dilakukan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Selain itu, pada penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan *incidental sampling* (sampel insidental) yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2012).

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap untuk terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam



penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah., sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.

### 3.7 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah *text* dan *image*. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989) *text* adalah data yang berbentuk alphabet ataupun angka sedangkan *image* adalah data yang memberikan informasi secara spesifik tentang keadaan tertentu seperti foto, kartun, grafik dan sejenisnya, data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengamatan, wawancara langsung dan pengisian kuisioner oleh responden. Responden adalah masyarakat Desa Sitarjo yang mewakili setiap komunitas di desa tersebut. Selain itu data primer juga diperoleh dari informan yaitu pemuka adat dan Kepala Desa. Data primer meliputi data yang didapatkan secara langsung dari responden secara langsung.

Data sekunder diperoleh dari *literature*, dokumentasi berupa laporan atau arsip dari instansi terkait yang ada di desa Sitarjo. Seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, kantor Kepala Desa.

### 3.8 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin (Sugiyono, 2012).

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama yaitu mengetahui dan menganalisis profil Desa Sitarjo terkait Pengembangan Desa Peisisir Tangguh dapat digunakan dengan bantuan tabel di bawah ini :

**Tabel 1.** Profil Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Desa Sitarjo

No	Variable Profil	Fakta	Harapan
1	Biogeofisik Desa		
	a. Sejarah dan Struktur Pemerintah Desa	√	-
	b. Geografi dan Administrasi	√	-
	c. Geomorfologi dan Kondisi Tanah	√	-
	d. Hidro Oseanografi	√	-
2	Kondisi Sosial Budaya		
	a. Kependudukan	√	√
	b. Struktur dan Sarana Prasarana Sosial	√	√
	c. Kelembagaan	√	√
3	Kondisi Ekonomi		
	a. Aktivitas Ekonomi Masyarakat	√	√
	b. Kelembagaan ekonomi	√	√
4	Infrastruktur		
	a. Sarana dan Prasarana Dasar	√	√
	b. Sarana dan Prasarana Pendukung	√	√
5	Potensi dan Pemanfaatan SDA		
	a. Pertanian	√	√
	b. Ekosistem Pesisir	√	√
	c. Perikanan	√	√
	d. Pariwisata	√	√
	e. Industri Maritim	√	√

Keterangan : (√) = ada , (-) = tidak ada

Untuk mencapai tujuan penelitian kedua yaitu mengetahui dan mempelajari masalah yang paling mendesak di Desa Sitarjo terkait Pengembangan Desa Pesisir Tangguh dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan bantuan tabel masalah dibawah ini :

**Tabel 2.** Masalah-masalah di Desa Sitarjo

No	Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total skor	Rangking Prioritas
1	Tingginya pencemaran berupa sampah karena belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA)					
2	Terjadinya degradasi lingkungan					
3	Adanya over-eksploitasi sumber daya alam					
4	Abrasi pantai					
5	Perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya					
6	Lain-lain					

Untuk mencapai tujuan penelitian ketiga yaitu untuk mengetahui rencana aksi masyarakat Desa Sitarjo dalam mendukung program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan



responden masyarakat desa Sitarjo untuk mengetahui masalah utama yang dihadapi di Desa Sitarjo yang didapatkan pada tujuan kedua. Setelah itu responden akan memberikan rangking terhadap lembaga-lembaga yang ada di Desa Sitarjo yang dianggap paling dekat dan terpercaya dalam penyelesaian masalah yang paling mendesak. Hal-hal yang didapat dalam FGD tampak dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3.** Rangking Lembaga Desa Sitarjo

No	Lembaga/ Organisasi	Rangking
1		
2		
3		
4		
5		

Setelah didapatkan masalah yang paling mendesak dan lembaga terdekat yang dianggap dapat membantu masyarakat Desa Sitarjo untuk menyelesaikan masalah tersebut, peneliti bersama masyarakat Desa Sitarjo akan dapat menentukan rencana aksi terkait Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Profil Desa

Menurut Sri Mulyani (1983), profil adalah pandangan sisi, garis besar atau biografi dari diri seseorang atau kelompok yang memiliki usia yang sama. Profil merupakan grafik, diagram atau tulisan yang menjelaskan suatu keadaan yang mengacu pada data seseorang untuk sesuatu.

Profil dapat dimengerti adalah suatu gambaran secara garis besar tergantung dari segi mana memandangnya. Untuk menjawab tujuan pertama yaitu mengetahui dan menganalisis profil Desa Sitarjo selaku Desa yang menerima program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Profil Desa Sitarjo secara keseluruhan dapat dilihat kondisi Biogeofisik, kondisi sosial-budaya, kondisi ekonomi, infrastruktur dan potensi SDA. Profil Desa Sitarjo selanjutnya di analisis terkait permasalahan pokok yang dialami oleh wilayah pesisir terkait Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).

#### 4.1.1. Kondisi Biogeofisik

##### A. Sejarah dan struktur pemerintahan desa

Menurut informasi dari para sesepuh. Desa Sitarjo didirikan oleh orang yang bernama Kyai Ngastowo pada tahun 1895 membuka hutan di daerah Palunglor. Babatan hutan palunglor inilah yang kemudian dinamakan Pondhok Dhulang dan karena berkembang pesat kemudian berubah nama menjadi Sitarjo.

Desa Sitarjo terbagi menjadi 4 wilayah dusun yaitu :

1. Dusun Sitarjo (Krajan)
2. Dusun Rowotrate
3. Dusun Tambak Redjo
4. Dusun Sendang Biru

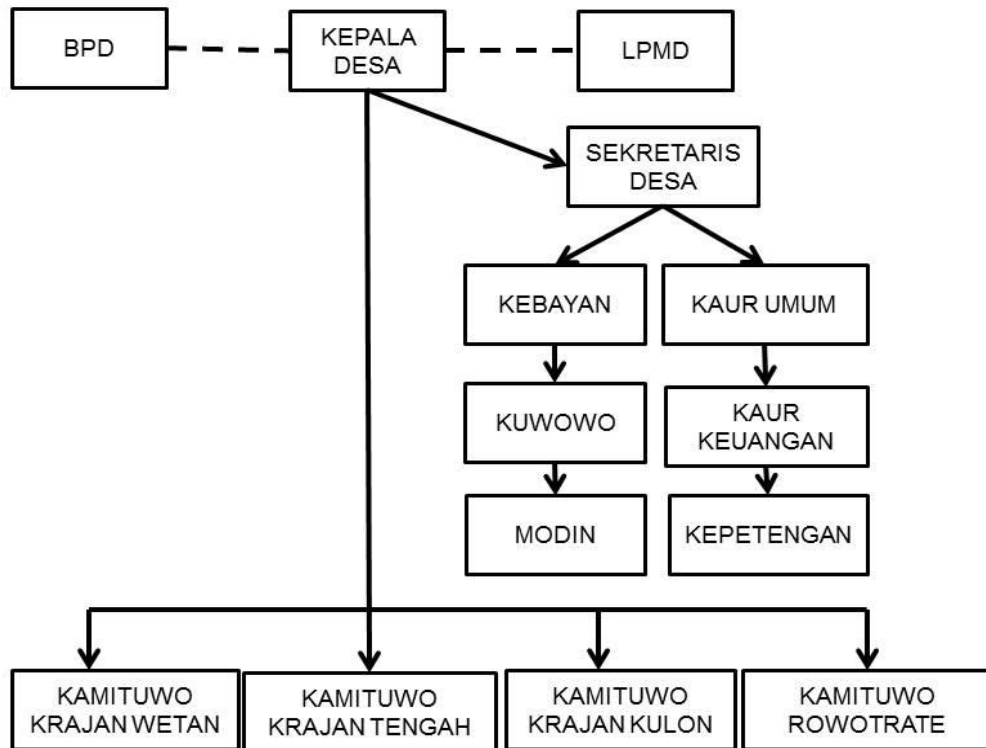


Dusun Tambak Redjo dan Dusun Sendang Biru pada tahun 1978 mengalami pemekaran menjadi desa sendiri sehingga Sitarjo hanya memiliki 2 (dua) dusun. Pada tahun 2012 wilayah Desa Sitarjo mengalami pemekaran yang semula terdiri dari 2 (dua) Dusun menjadi 4 (empat) Dusun yaitu :

1. Dusun Krajan Wetan
2. Dusun Krajan Tengah
3. Dusun Krajan Kulon
4. Dusun Rowotrate

**-Struktur Pemerintahan Desa**

Desa Sitarjo memiliki struktur kepemimpinan yang tidak lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi pemerintah Desa Sitarjo berikut ini:



**Gambar1.** Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sitarjo

Berdasarkan bagan struktur organisasi pemerintahan Desa Sitarjo dapat dilihat bahwa Desa Sitarjo dipimpin oleh seorang Kepala Desa bukan Lurah. Kepala Desa merupakan pimpinan dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat. Kepala Desa dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat. Usia minimal adalah 25 tahun dan siapapun dapat mencalonkan sebagai Kepala Desa (Putra Desa) dengan kriteria calon sesuai dengan kebijakan masing-masing desa yang menyelenggarakan Pilkades. Cara pemilihan Kepala Desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Sedangkan Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab kepada Camat yang pemilihan ditentukan oleh pemerintah. Lurah memiliki kriteria tertentu dalam pencalonannya seperti pendidikan formal minimal tingkat Sarjana. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa berkaitan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh :

- a. Kepala Desa : sebagai penanggung jawab dalam seluruh kegiatan PDPT
- b. BPD : sebagai mitra perangkat desa dalam menyusun kebijakan dan mengawal kegiatan terkait program PDPT
- c. LPMD : sebagai mitra perangkat desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur desa dan mengawal kegiatan terkait PDPT
- d. Sekretaris Desa : membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan PDPT dalam urusan administrasi
- e. Kaur : membantu Sekertaris desa dalam hal admniistrasi
- f. Kamituwo : membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan penyelenggaraan administrasi dan keuangan terkait program PDPT pada tingkat Dusun.



Kualitas perangkat Desa Sitarjo dari segi pendidikan bisa dikatakan cukup rendah, hal ini dapat dilihat pada tabel 4 tentang tingkat pendidikan perangkat Desa Sitarjo. Lulusan Sarjana hanya berjumlah 1 (satu) orang, lulusan SLTA/Sederajat berjumlah 13 orang dan sisanya 1 orang lulus SLTP/Sederajat. Berdasarkan tingkat pendidikan perangkat desa Sitarjo menunjukkan bahwa sumber Daya Manusia (SDM) di struktur pemerintahan Desa Sitarjo belum memenuhi kriteria sebagai pemangku kepentingan yang diharapkan dapat menjadi stakeholders dalam menyelesaikan 4 (empat) masalah pokok di wilayah pesisir. Tujuan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh akan terasa sulit direalisasikan apabila KKP selaku pemilik program tidak memberikan kekuatan yang maksimal terhadap kualitas Sumber Daya yang menjalankan. Dalam menyusun perencanaan pengembangan desa pesisir disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa dan wajib melibatkan kelembagaan masyarakat desa serta tokoh masyarakat. Berikut tingkat pendidikan Perangkat Desa Sitarjo :

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Sitarjo

No	Perangkat	Keterangan		
		SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	S1
1	Kepala Desa	-	1	-
2	Sekretaris Desa	-	1	-
3	Kepala Seksi	-	3	-
4	Kepala Urusan	-	3	1
5	Kepala Dusun	-	4	-
6	Staf	1	1	-
	Jumlah	1	13	1

**Sumber** : Data Profil Desa Sitarjo Tahun 2014

Selain perangkat desa, lembaga pemerintahan yang ada di Desa Sitarjo adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perum Perhutani (di bawah Kementerian BUMN). Karena wilayah Desa Sitarjo sebagian besar adalah hutan lindung maka keberadaan Perhutani di Desa Sitarjo cukup menonjol. Perhutani memiliki tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan

Sumber Daya Hutan (SDH) dengan memperhatikan aspek produksi/ ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan. Sedangkan wilayah Desa Sitarjo sektor perikanan dan kelautan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang. DKP Kabupaten Malang bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati. Wilayah Desa Sitarjo dengan potensi perikanan dan kelautan terletak sangat jauh dari pusat desa. Hal ini menjadi salah satu penyebab belum maksimalnya pengelolaan potensi perikanan dan kelautan yang dimiliki Desa Sitarjo. Desa Sitarjo sebenarnya memiliki beberapa kawasan pantai yang memiliki potensi besar apabila dikelola dengan baik, namun hingga saat ini hanya pantai "GOA CINA" yang sudah dimanfaatkan dan dibuka sebagai objek wisata. Berdasarkan informasi dari pihak DKP terkait pengelolaan kawasan pesisir Desa Sitarjo yang belum maksimal, adanya perebutan kawasan di Desa Sitarjo oleh pihak Perhutani merupakan salah satu alasan hal tersebut. Perhutani menekankan bahwa seluruh hutan lindung yang ada di Desa Sitarjo merupakan daerah kewenangan Perhutani. Hutan lindung di Desa Sitarjo banyak yang beralih fungsi menjadi hutan produksi dan belum ada upaya dari pihak Perhutani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, bahkan banyak lahan yang seharusnya untuk hutan lindung ditanami pohon-pohon produksi seperti kayu jati dan kayu sengon. Wilayah kewenangan DKP sendiri masih belum jelas atau tumpang tindih dengan wilayah kewenangan Perhutani. Hal ini berdampak dengan tidak optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Desa Sitarjo sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap kas Desa Sitarjo sendiri. Namun demikian dalam mengantisipasi semakin rumitnya permasalahan yang tiada ujung antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, Perhutani dan Perangkat Desa Sitarjo sendiri, Desa selaku pemilik wewenang utama terhadap pengelolaan pesisir Desa Sitarjo telah



membuat Hukum yang mendukung adanya program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh yaitu Peraturan Desa Sitarjo tentang Perlindungan Wilayah Pesisir dan Laut dan Peraturan Desa Sitarjo tentang Rencana Pengembangan Desa Pesisir dimana keduanya disusun pada tahun 2014.

### *B. Geografi dan Administrasi*

Secara geografis Desa Sitarjo terletak pada  $7^{\circ}21'$  –  $7^{\circ}31'$  LS dan  $110^{\circ}10'$  –  $111^{\circ}40'$  BT. Jarak tempuh Desa Sitarjo ke Ibu Kota Kecamatan adalah 18 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit, sedangkan jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 58 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit.

Secara administrasi, Desa Sitarjo terletak di wilayah Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa tetangga yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumberagung
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambakrejo dan Kedungbanteng
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sidodadi dan Gajah Rejo Kecamatan Gedangan.

Berdasarkan letak geografi dan administrasi Desa Sitarjo dapat dilihat bahwa Desa Sitarjo berada sangat jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten. Hal ini berdampak terhadap lambatnya penanganan apabila terjadi masalah yang berhubungan dengan administrasi pusat. Kondisi ini juga menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas infrastruktur desa Sitarjo sendiri.

### *C. Geomorfologi dan kondisi tanah*

Topografi Desa Sitarjo terdiri dari dataran dan perbukitan dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3.



**Gambar 2.** Wilayah Desa Sitarjo berupa Dataran



**Gambar 3.** Wilayah Desa Sitarjo berupa Perbukitan

Wilayah berupa dataran memiliki luas 555 Ha atau 16,7% dan perbukitan/pegunungan memiliki luas 2.758 Ha atau 83,3%. Ketinggian wilayah desa berupa dataran berada sekitar 5-10 meter di atas permukaan air laut. Wilayah dataran rendah berupa lembah (cekungan) dikelilingi oleh perbukitan kapur dengan ketinggian berkisar 200m – 650m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2008, selama tahun 2010 curah hujan di Desa Sitarjo rata-rata mencapai 2.800 mm.

#### **-Kondisi tanah**

Kondisi tanah di Desa Sitarjo sesuai topografi maka terdapat dua jenis yaitu dataran rendah dan perbukitan dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Kondisi tanah di dataran rendah berupa tanah humus yaitu tanah yang dilapiskan atas berwarna gelap bersifat gembur. Tanah humus terbentuk dari pembusukan



tumbuh-tumbuhan. Lahan persawahan di Desa Sitarjo terdapat beberapa kelas berdasarkan kesuburannya:

- Sangat subur : 432 Ha
- Subur : 2.561 Ha
- Sedang : 321 Ha

Kondisi tanah di perbukitan berupa perbukitan kapur yang merupakan jenis *podzolik*. Tanah *podzolik* mudah ditemukan di pegunungan bercurah tinggi dan beriklim sedang. Tanah jenis ini terbentuk dari pelapukan batuan yang mengandung banyak kuarsa sehingga warna tanah ini kecoklatan. Tanah ini kurang subur karena mineral terbawa oleh air hujan.

Di Dusun Rowotrate terdapat dua lokasi lahan yang tingkat pemanfaatannya dari segi produktivitas kurang baik. Lahan tersebut berupa areal persawahan yang secara topografi dikelilingi oleh perbukitan yang gundul. Di areal tersebut juga terdapat rawa yang sama sekali tidak produktif dari segi pertanian, namun di dalamnya terdapat sumberdaya ikan gabus yang cukup besar. Pada waktu musim penghujan lokasi ini menjadi tempat berkumpulnya air dari perbukitan di sekitarnya merendam areal persawahan sehingga dapat menyebabkan tanaman padi mati.

#### **-Kebencanaan**

Pada tahun 1996-2000 terjadi penggundulan dan penjarahan hutan secara besar-besaran oleh masyarakat baik lokal maupun luar desa. Topografi lahan berupa perbukitan dengan tingkat kemiringan tajam yang semula berupa hutan dengan pepohonan yang lebat berubah menjadi hutan gundul dan beralih fungsi menjadi ladang tanaman palawija. Perbukitan yang semula hijau kini menjadi gundul dan mudah mengalami longsor dan banjir. Beberapa tahun terakhir, pihak Perhutani memberlakukan penutupan (dari segala jenis

pemanfaatan oleh penduduk) di beberapa area perbukitan yang memiliki kemiringan terjal. Dengan peraturan tersebut diharapkan areal tersebut akan pulih dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Hasilnya beberapa tahun terakhir intensitas dan volume banjir dan longsor mulai berkurang. Lokasi yang rawan longsor yang berdampak langsung pada masyarakat yaitu hutan di atas sepanjang jalan menuju Dusun Rowotrate sampai JLS (Jalur Lintas Selatan), tebing di wilayah Krajan Kulon dan Krajan tengah.

Masih banyak lokasi yang jauh dari pemukiman yang terus (sering) mengalami longsor. Lokasi tersebut merupakan areal hutan yang telah beralih fungsi menjadi perladangan masyarakat dimana pihak lahan tersebut di bawah perhutani.

Selain area perbukitan longsor juga banyak terdapat di tepi sepanjang sungai sampai ke arah muara. Longsor di tepian sungai mengakibatkan pendangkalan sungai. Material tanah dari sungai juga terbawa sampai ke laut yang pada akhirnya akan merusak terumbu karang sebagian besar berada hampir di seluruh area tepi pantai-pantai Desa Sitarjo. Klondisi sungai di Desa Sitarjo dapat dilihat pada gambar 4 dan gambar 5.



**Gambar 4.** Sungai di Desa Sitarjo mengalami pendangkalan





**Gambar 5.** Sungai Desa Sitarjo yang sering mengalami longsor

Topografi Desa Sitarjo berada di lembah (cekungan) yang dikelilingi oleh rangkaian perbukitan/ pegunungan kapur dapat dilihat pada gambar 6. Rangkaian perbukitan/ pegunungan kapur tersebut merupakan wilayah dari beberapa desa dan kecamatan yang berbatasan secara langsung maupun tidak langsung dengan Desa Sitarjo, berdasarkan pengamatan pada peta topografi dan wawancara terhadap penduduk, desa-desa tersebut secara langsung/ tidak langsung mengalirkan airnya ke sungai yang akhirnya bermuara di Desa Sitarjo. Banyak diantara wilayah perbukitan tersebut digunakan sebagai lahan pertanian tebu yang tentunya tidak mampu menahan laju air hujan, pihak desa dalam berbagai forum pertemuan dengan perangkat desa-desa tersebut sering menyampaikan permasalahan tersebut, namun hingga saat ini belum mendapat respon yang baik. Sampai kapanpun, Desa Sitarjo tidak akan dapat terhindar dari banjir apabila tidak ada langkah nyata dan tegas dari seluruh desa terkait untuk memperbaiki pola pemanfaatan lahan perbukitan tersebut. Air dari perbukitan tersebut teralirkan menuju dua sungai yaitu sungai Mbambang dan sungai Kedungbanteng. Kedua aliran sungai tersebut bertemu menjadi satu dan membentuk satu aliran di Dusun Rowotrate. Hal ini yang menyebabkan Dusun Rowotrate menjadi kawasan paling rawan terhadap banjir. Selain volume air

yang besar, arus dari kedua aliran sungai yang bertemu membentuk arus yang lebih besar.



**Gambar 6.** Peta Topografi lokasi Desa Sitarjo  
Sumber : Google Earth, 2015

#### ***-Kondisi pantai***

Pesisir Desa Sitarjo membentang dari Barat ke Timur yaitu dari muara sungai ungapan sampai teluk di Clongop. Sungai menjadi area pembatas antara Desa Sitarjo dengan Desa Bajulmati, sementara Clongop menjadi perbatasan dengan Desa Tambakrejo (Sendang Biru). Pantai yang membentang tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kawasan (dari Barat ke Timur) yaitu :

1. Pantai Leter Barat
2. Pantai Leter Timur
3. Pantai Goa Cina
4. Pantai Semenggung Barat
5. Pantai Semenggung Timur

Wilayah sempadan pantai, pantai-pantai tersebut di atas (100 meter dari bibir pantai), mengalami degradasi lingkungan dapat dilihat pada gambar 7. Awalnya kawasan pantai merupakan hutan yang lebat. Pada tahun 1998 terjadi penggundulan hutan merubah fungsi hutan menjadi lahan oleh masyarakat



pendatang. Namun karena lokasi lahan di pantai kurang produktif, banyak wilayah pesisir pantai yang setelah penggundulan hutan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi lading sehingga dibiarkan terbengkalai (gundul).



**Gambar 7.** Sempadan pantai Desa Sitarjo mengalami degradasi lingkungan

Kondisi muara di ungapan juga mengalami degradasi lingkungan. Mangrove di sepanjang aliran sungai hanya tinggal 1-2 meter saja dari bibir sungai, bahkan banyak diantaranya habis sama sekali dan sudah menjadi lading yang hanya ditanami pohon pisang yang tidak dapat menyangga tanah. Banyak tepian sungai yang terkikis oleh banjir karena di sepanjang sungai ditanami pohon pisang dan kelapa yang tidak kuat menahan tanah. Muara sungai juga mengalami sedimentasi. Pada waktu ombak besar, pasir memenuhi area muara bahkan bisa sampai tertutup sama sekali dari laut. Namun, pada musim penghujan air sungai yang cukup besar membawa material pasir tersebut ke laut. Area muara ungapan terlindungi oleh bukit (ditunjukkan pada gambar 8), sehingga angin laut maupun arus dari air laut tidak memberi pengaruh. Kondisi perairan di muara selama tidak pada musim hujan sangat tenang.



**Gambar 8.** Peta kondisi Pesisir pantai Desa Sitarjo  
Sumber : Google Earth, 2015

Berdasarkan cerita orang yang tinggal di sekitar pantai, pasang air laut bisa mencapai 5 km dari bibir pantai. Kini, pada waktu tertentu air laut mengalami pasang sampai sejauh 50 meter dari bibir pantai. Pasang air laut melalui muara sungai memiliki jangkauan hingga 3 km. ini terlihat dari kandungan air laut yang masih terkandung dalam air sungai, sehingga saat air pasang tidak dapat digunakan untuk mengairi sawah. Pasang surut air laut pada hari-hari biasa tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat, namun pasang surut air laut dapat menjadi bencana apabila terjadi luapan air sungai sehingga menyebabkan banjir di Dusun Rowotrate. Volume air sungai (banjir) akan semakin tinggi karena pertemuan air laut, air sungai Mbambang dan sungai Kedungbanteng, hal itu yang terjadi pada banjir bandang pada tahun 2003 silam dengan ketinggian air mencapai 3 meter dengan luas genangan mencapai 30% dari luasan desa.

Dilihat dari kondisi tanah, kebencanaan dan kondisi pantai, Desa Sitarjo merupakan wilayah pesisir dengan rentan bencana yang sangat tinggi. Upaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan bencana alam tersebut sudah dan terus dilakukan oleh pihak desa maupun masyarakat Desa Sitarjo sendiri. Penanganan 4 (empat) permasalahan pokok yang sedang dihadapi oleh wilayah



pesisir yaitu (1) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir (2) tingginya kerusakan sumber daya pesisir (3) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa dan luntarnya nilai-nilai budaya lokal dan (4) minim dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman menjadi sedikit terganggu karena terjadinya bencana alam yang tidak diduga. Kesiapan Desa Sitarjo (Pemerintah Desa bersama masyarakat) sangat dibutuhkan dalam meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam tersebut.

#### *E. Hidro Oseanografi*

##### **-Kondisi hidrologi**

Topografi Dsea Sitarjo terbagi atas perbukitan kapur dan dataran rendah. Masyarakat yang bermukim di perbukitan, menggunakan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat dua sumber mata air yang digunakan dimana keduanya berada di Dusun Krajan Wetan (Sumbermbag). Kedua sumber mata air tersebut mengalami penurunan debit air yang cukup signifikan. Hal ini terjadi akibat adanya pengundulan hutan di kawasan perbukitan tersebut.

Masyarakat yang bermukim di dataran rendah memanfaatkan air sumur untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara masyarakat pendatang yang bermukim di kawasan Goa Cina juga tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air karena mereka mendapatkan air dengan menggali sumur yang tidak terlalu dalam.

Kondisi hutan yang rusak juga berpengaruh pada ketersediaan air permukaan. Pada musim kemarau banyak diantara sumur warga yang mengalami penurunan debit airnya, bahkan ada yang sampai kering. Warga yang berada di Dusun Krajan Wetan (Sumbermbag) memanfaatkan sumber mata air yang juga mengalami penurunan debit air.

Selain dua sumber mata air utama tersebut, dahulu di area hutan di atas pemukiman Dusun Rowotrate juga banyak terdapat sumber mata air. Kini

sumber mata air tersebut hilang dengan sendirinya bahkan ada diantaranya sengaja dimatikan. Tindakan tersebut semata-mata agar aliran tersebut dapat berpindah ke area dimana warga membuat sumur.

#### ***-Kondisi oseanografi***

Arus laut adalah gerakan molekul air laut yang pada umumnya dengan arah horizontal dan vertikal atau bisa juga arus laut yang mempunyai pergerakan air laut yang mempunyai peredaran tetap dan teratur. Sebagaimana wilayah perairan Selatan, arus dan gelombang di pesisir pantai Desa Sitarjo juga cukup tinggi. Namun keberadaan pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh kawasan pantai membuat arus dan gelombang tersebut dapat diredam sehingga tidak terlalu besar. Sampai saat ini belum terdapat lembaga yang melakukan penelitian kelautan di Desa Sitarjo.

Berdasarkan kondisi hidrologi dan oseanografi Desa Sitarjo dapat disimpulkan bahwa penebangan hutan secara sembarangan sangat berdampak terhadap kondisi sumber mata air yang ada di Desa Sitarjo. Kerusakan sumber daya alam yang terjadi memberikan permasalahan yang berdampak sangat luas. Kondisi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai peningkatan kinerja perangkat Desa bersama masyarakat Desa Sitarjo agar tidak terjadi kondisi yang lebih parah. Desa Sitarjo termasuk dalam wilayah pesisir Indonesia yang sedang dihadapkan pada 4 (empat) permasalahan pokok yang telah dibahas di sub bab sebelumnya

#### **4.1.2. Kondisi Sosial-Budaya**

##### ***A. Kependudukan***

Berdasarkan data administrasi Pemerintah Desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Sitarjo adalah terdiri dari 7.679 penduduk dengan rincian 2.924 KK, 4.009 berjenis kelamin perempuan dan 3.670 berjenis kelamin laki-laki. Uraian jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 5.



**Tabel 5.** Jumlah Penduduk Desa Sitarjo berdasarkan Usia

NO	USIA (TAHUN)	JUMLAH (ORANG)	PRESENTASE (%)
1	0-4	337	4.39
2	5-9	350	4.55
3	10-14	436	5.68
4	15-19	508	6.61
5	20-24	593	7.72
6	25-29	664	8.64
7	30-34	685	8.92
8	35-39	700	9.11
9	40-44	687	8.94
10	45-49	675	8.80
11	50-54	681	8.87
12	55-58	513	6.69
13	>59	850	11.07
	<b>JUMLAH</b>	<b>7679</b>	<b>100</b>

Sumber : Profil Desa Sitarjo 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Sitarjo dengan usia produktif (20-49 tahun) sebanyak 4.004 orang atau presentase mencapai 53%. Usia produktif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kemajuan Desa Sitarjo. Kreasi dan inovasi yang dihasilkan pada usia produktif dapat digunakan sebagai faktor pendukung tercapainya program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Peran lembaga atau komunitas di Desa Sitarjo dituntut untuk dapat memberikan dorongan agar langkah awal dalam penyelesaian 4 (empat) permasalahan pokok kawasan pesisir dapat berjalan dengan lancar.

Penduduk Desa Sitarjo banyak yang menempati di Dusun Krajan (Krajan Kulon, Tengah dan Wetan) seperti pada tabel berikut:

**Tabel 6.** Jumlah RT/RW di Desa Sitarjo

No	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Krajan Wetan	21	4
2	Krajan Tengah	15	4
3	Krajan Kulon	20	5
4	Rowotrate	5	2
	Jumlah	61	15

Sumber : Profil Desa Sitarjo 2014

Melihat pada tabel 6 dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Sitarjo yang tinggal di wilayah pesisir (Dusun Rowotrate) hanya sedikit. Hal ini disebabkan letak dusun yang jauh dari pusat desa.

## B. Struktur dan Sarana Prasarana Sosial

Tingkat pendidikan penduduk Desa Sitarjo berdasarkan data profil Desa tahun 2014 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sitarjo

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Tidak tamat SD/ sederajat	898 Orang
2	Tamat SD/ Sederajat	991 Orang
3	Tamat SMP/ Sederajat	3958 Orang
4	Tamat SMA/ Sederajat	1211 Orang
5	Tamat D-1	41 Orang
6	Tamat D-2	14 Orang
7	Tamat D-3	12 Orang
8	Tamat S-1	89 Orang
9	Tamat S-2	2 Orang
10	Tamat S-3	-

**Sumber : Profil Desa Sitarjo, 2014**

Berdasarkan data dari profil Desa Sitarjo tahun 2014, jumlah penduduk usia 15-55 tahun yang belum bekerja (pengangguran) sebanyak 489 orang sedangkan jumlah angkatan kerja usia 15-55 tahun sebanyak 5.392 orang. Hal ini tidak terlepas dengan banyaknya jumlahnya masyarakat Desa Sitarjo yang tamat SLTP/ Sederajat dapat dilihat pada tabel 7. Kondisi ini juga dapat dijadikan sebagai acuan kinerja perangkat desa dalam meningkatkan ketrampilan penduduknya agar dapat tetap membantu dalam menyelesaikan program-program pemerintah khususnya Pengembangan Desa Pesisir Tangguh.

Berdasarkan pengamatan di lapang, Desa Sitarjo memiliki potensi di bidang pertanian yang sangat tinggi. Hal ini memungkinkan kesempatan kerja yang besar bagi masyarakat Desa Sitarjo. Pada musim panen dan tanam padi, pemilik lahan sering kali mengalami kekurangan tenaga kerja. Namun hal tersebut masih belum mampu menyerap tenaga kerja pengangguran karena bersifat tertutup bagi anggota keluarga pemilik lahan atau orang-orang terdekat yang sudah dipercaya. Mata pencaharian di Desa Sitarjo sebagian besar adalah sebagai petani, pekerja di sektor jasa/perdagangan dan pekerja di sektor industri untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel. 8** Mata Pencaharian Penduduk Desa Sitiarjo

No	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Petani	2536	76,3
2	Pekerja di sektor jasa/perdagangan	483	14,5
3	Pekerja di sektor industri	303	9,1
	<b>Jumlah</b>	<b>3322</b>	<b>100</b>

**Sumber : Profil Desa Sitiarjo 2014**

Sarana dan prasarana sosial di Desa Sitiarjo cukup lengkap seperti tercantum pada tabel berikut ;

**Tabel 9.** Sarana dan Prasarana Desa Sitiarjo

No	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Sosial		
	a. Lapangan sepak bola	2 buah	Baik
	b. Lapangan volly	5 buah	Baik
	c. Lapangan bulutangkis	2 buah	Baik
2	Pendidikan		
	a. Taman Kanak-Kanak	2 buah	Baik
	b. SD/Sederajat	4 buah	Baik
	c. SMP/Sederajat	1 buah	Baik
	d. SMA/Sederajat	1 buah	Baik
3	Rumah Ibadah		
	a. Masjid	3 buah	Baik
	b. Langgar/Surau	2 buah	Baik
	c. Gereja	18 buah	Baik
4	Fasilitas kesehatan		
	a. Puskesmas	1 buah	Baik
	b. Polindes	1 buah	Baik
	c. Rumah memiliki WC	1.587 buah	Baik
5	Prasarana Air-Bersih		
	a. Sumur pompa	34 buah	Baik
	b. Sumur gali	1.097 buah	Baik
	c. Perpipaan	1 buah	Baik
	d. Mata air	3 buah	Baik

**Sumber : Profil Desa Sitiarjo 2014**

Sarana dan prasarana yang ada di desa Sitiarjo juga dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 9.** Kantor Balai Desa Sitiarjo



Gambar 10. Puskesmas Desa Sitarjo



Gambar 11. Gereja Desa Sitarjo



Gambar 12. Masjid Desa Sitarjo





**Gambar. 13** Kondisi Lapangan Desa Sitarjo



**Gambar. 14** Kondisi Sekolah Desa Sitarjo

Tingkat keamanan di Desa Sitarjo beberapa tahun lalu sangat rawan. Banyak preman berkeliaran di jalan yang berada di kawasan hutan menuju Desa Sitarjo. Penduduk Desa Sitarjo dan desa lain yang melalui jalan tersebut tidak berani melintas pada saat hari menjelang malam. Pasar Desa Sitarjo juga menjadi tempat para preman melakukan tindak kejahatan. Saat ini kondisi area Desa Sitarjo sudah aman, masyarakat sudah tidak was-was lagi dalam beraktifitas sehari-hari. Tindakan tegas dari Pemerintah Desa dan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak kepolisian telah membuat preman jera dalam tindakannya. Namun upaya-upaya untuk menjaga keamanan desa terus dilakukan karena apabila masyarakat lengah hal tersebut dapat muncul kembali.

### C. Kelembagaan Sosial Budaya

Kaum perempuan di Desa Sitarjo memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Selain mengurus rumah, hampir semua perempuan yang tidak memiliki anak balita aktif ikut mengolah lahan pertanian dan juga ternak. Selain dalam bidang pekerjaan kaum perempuan juga aktif dalam organisasi baik dalam Pemerintah Desa maupun keagamaan. Salah satu bukti nyata adalah terwakilinya kaum perempuan dalam organisasi tingkat desa (BPD) sebanyak dua orang (Profil Desa Sitarjo, 2014). Kelompok PKK Desa Sitarjo juga cukup aktif dalam menjalankan program-programnya.

Dalam bidang keagamaan, kaum perempuan aktif mengadakan kebaktian perempuan (Kristen) dan tahlilan (Islam). Tokoh kaum perempuan Kristen juga aktif dalam kepengurusan Gereja, baik ditingkat Dusun, Desa maupun antar wilayah.

Kearifan lokal di kalangan masyarakat Desa Sitarjo masih tetap terjaga. Beberapa kegiatan yang mencerminkan pelestarian kearifan lokal tersebut diantaranya berupa diadakannya acara bersih desa dan gotong royong. Acara bersih desa yang disebut *Encek-Encekan* oleh masyarakat Desa Sitarjo dilaksanakan setiap bulan Juni bertepatan dengan selesainya musim panen. Bersih Desa merupakan bentuk rasa syukur masyarakat pada Tuhan atas berkah alam berupa hasil panen yang melimpah.

Kegiatan gotong-royong di masyarakat juga masih sangat terjaga. Gotong-royong dilaksanakan bukan hanya dalam kegiatan untuk kepentingan umum, namun juga di pekerjaan (pertanian) dan kegiatan pribadi warga. Gotong-royong dilaksanakan pada saat pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat umum untuk kepentingan bersama contohnya perbaikan jalan, membersihkan lingkungan. Gotong-royong dikalangan petani berupa kegiatan saling bahu-membahu pada saat panen padi. Setiap orang yang mampu



memanen 10 karung gabah, akan memperoleh imbalan 1 karung gabah. Pada saat panen inilah masyarakat yang tidak mempunyai sawah, turut memperoleh berkah karena dapat memperoleh penghasilan yang cukup besar.

Gotong-royong dalam kehidupan pribadi yang masih dilestarikan adalah saling membantu pada kegiatan hajatan. Tetangga dan sanak saudara saling membantu untuk mempersiapkan pesta perayaan, mulai dari mempersiapkan makanan, tempat dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, dari persiapan sampai selesai hingga bersih-bersih.

Kelembagaan sosial Desa Sitarjo dapat dikatakan menjalankan tugasnya sangat baik. Masyarakat Desa Sitarjo sangat dekat dengan lembaga sosial khususnya lembaga keagamaan. Hal ini dapat dijadikan sebagai kendaraan dalam menyukseskan program Pengembangan Desa pesisir Tangguh. Mengingat peran Pemerintah Desa yang sangat besar dalam program ini, diharapkan Desa dapat memberikan peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pada lembaga-lembaga sosial yang ada di Desa Sitarjo sehingga dapat tercapainya tujuan dengan baik.

#### **4.1.3. Kondisi Ekonomi**

##### *A. Aktivitas ekonomi masyarakat*

Berdasarkan data profil Desa Sitarjo tahun 2014, sebagian besar penduduk Desa Sitarjo bekerja sebagai petani sebanyak 2536 orang (76%). Selain mengolah lahan sawah dan kebun, sebagian besar masyarakat juga memiliki ternak berupa sapi, kambing, ayam dan lain-lain. Hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor jasa/ perdagangan sebanyak 483 orang (14,5%) dan sektor industri 303 orang (9%) yang dapat dilihat pada tabel 8. Mata pencaharian penduduk di bidang jasa/ perdagangan terdiri dari beberapa bidang seperti tersaji padal tabel berikut :

**Tabel. 10** Mata Pencaharian Penduduk Desa Sitarjo di Bidang Jasa

No	Status	Pemilik	Pekerja
1	Jasa Pemerintahan/ Non Pemerintahan		
	a. Pegawai Desa		16
	b. Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	1) Pegawai Kelurahan		1
	2) PNS		22
	3) ABRI		6
	4) Guru		38
	5) Dokter		1
	6) Bidan		2
	7) Perawat		3
	8) Lain-lain		12
	c. Pensiunan ABRI/Sipil		64
	d. Pegawai swasta		347
	e. Pensiunan swasta		347
	f. Pegawai Koperasi	4	24
2.	<b>Jasa Perdagangan</b>		
	a. Pasar Desa	1	379
	b. Warung	8	8
	c. Kios	18	18
	d. Toko	71	78
3.	<b>Jasa Angkutan/ Transportasi</b>		
	a. Angkutan bermotor	29	29
	b. Mobil Kendaraan umum	4	8
4.	<b>Jasa Keterampilan</b>		
	a. Tukang kayu		52
	b. Tukang Batu		44
	c. Tukang Jahit/ bordir		9
	d. Tukang cukur		7
	e. Jasa Listrik, Gas dan Air		3
	f. Persewaan		4

**Sumber : Profil Desa Sitarjo 2014**

Masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan sangat sedikit dan semuanya berdomisili di Dusun Rowotrate. Nelayan Desa Sitarjo merupakan nelayan kecil yang selama ini mencari ikan dengan memasang jaring di area terumbu karang dengan cara berenang dan menyelam karena tidak memiliki alat bantu penangkapan berupa perahu. Dahulu mereka memiliki perahu meski ukurannya kecil, tapi saat ini sudah tidak ada. Ada diantaranya yang hilang dicuri orang, ada juga yang hanyut terbawa air. Banyak diantara nelayan yang terpaksa menjadi ABK perahu atau menjalankan perahu milik juragan dari Sendang Biru. Nelayan Desa Sitarjo pada tahun 2014 baru memiliki Kelompok Nelayan yang diketuai oleh Bapak Yudi selaku nelayan dan nahkoda yang



beroperasi di kawasan Sendang Biru. Kelompok nelayan ini dibentuk karena adanya kegiatan PDPT sehingga dapat memudahkan para nelayan untuk mengajukan bantuan pada pemerintah apabila terjadi kesulitan-kesulitan pada nelayan. Karena masih baru terbentuk, program yang dilakukan oleh kelompok nelayan Desa Sitarjo masih sedikit.

Berdasarkan data dari lapang melalui Kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 40 orang dari berbagai profesi diketahui bahwa pendapatan keluarga Desa Sitarjo perhari rata-rata sebesar Rp. 50.000,- per keluarga.

Di Indonesia untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan, menggunakan beberapa versi indikator diantaranya sebagai berikut :

- a. Versi Bank Dunia, kemiskinan diukur secara ekonomi berdasarkan penghasilan yang diperoleh orang miskin adalah mereka yang berpendapatan maksimal US \$ 2 per hari = Rp. 25.000,- sehari
- b. Versi *Internasional Labour Organization* (ILO) yaitu orang miskin di pedesaan jika pendapatan maksimal US\$ 0,8 = Rp. 10.000,- per hari

Kegiatan perikanan di Desa Sitarjo terdiri atas perikanan terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya air tawar. Perikanan tangkap dijalankan dengan peralatan yang sangat terbatas yaitu menggunakan jaring *gill net* di area terumbu karang. Hasil ikan tangkapan berupa ikan-ikan karang seperti udang barong, kakap, tambakan, kerapu dan lain-lain. Data produksi perikanan tangkap di Desa Sitarjo belum ada sama sekali. Sementara perikanan air tawar di Desa Sitarjo masih sangat terbatas untuk konsumsi pribadi. Mengingat lokasi Desa Sitarjo yang sangat rawan terhadap bencana menjadikan warga Sitarjo tidak tertarik dalam kegiatan budidaya.

Masyarakat Desa Sitarjo sendiri sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh Tani. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Desa Sitarjo bukan tanpa alasan. Jiwa masyarakat

Desa Sitarjo dapat dikatakan sangat rendah dalam bidang kelautan dan perikanan. Hanya beberapa masyarakat Desa Sitarjo yang memang memiliki jiwa kelautan dan perikanan. Masyarakat tersebut hampir sebagian besar adalah masyarakat yang memang mata pencaharian di bidang kelautan dan perikanan, serta masyarakat yang tempat tinggalnya di dekat laut. Dari sisi ini dapat dilihat bagaimana program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh kurang berjalan dengan optimal sehingga permasalahan pokok yang dialami Desa Sitarjo sulit untuk segera diselesaikan.

#### *B. Kelembagaan Ekonomi*

Lembaga ekonomi secara formal yang ada di Desa Sitarjo berupa koperasi. Terdapat 4 (empat) buah koperasi yang melayani masyarakat yaitu :

1. Kopdit Cendana
2. Koperasi Prajurit (KopPas)
3. Koperasi Patitis Sae
4. Koperasi Dharma Wanita (Kopwan)

Gambar koperasi yang ada di Desa Sitarjo dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 15.** Koperasi Cendana





Gambar 16. Koperasi Prajurit



Gambar 17. Koperasi Patitis Sae



Gambar 18. Koperasi Dharma Wanita

Selain lembaga ekonomi formal tersebut, ada banyak lembaga ekonomi non formal yang berkembang di masyarakat Desa Sitarjo. Diantaranya yang

sangat banyak jumlah dan jenisnya adalah arisan. Jenis-jenis arisan tersebut diantaranya.

1. Arisan gabah : yang dikumpulkan berupa gabah hasil panen 1 kali setahun pada musim panen, jumlah yang dikumpulkan per orang bervariasi. Ada kelompok yang mematok 1 karung, ada juga yang mematok 1 kwintal dan lain-lain sesuai kesepakatan anggotanya.
2. Arisan beras : yang dikumpulkan berupa beras (gabah yang sudah digiling). Biasanya dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam satu tahun. Jumlah beras yang dikumpulkan bervariasi ada yang mematok 50 kg ada juga yang 25 kg.
3. Arisan uang : yang dikumpulkan berupa uang, biasanya dilakukan setiap bulan. Jumlah uang yang dikumpulkan per orang sebesar Rp. 100.000, per bulan.

Arisan yang diikuti biasanya digunakan sebagai sarana untuk menabung. Masyarakat biasanya mengikuti arisan lebih dari satu jenis. Peserta arisan adalah ibu-ibu, tentu dengan sepertujuan suaminya.

Melihat banyaknya nasabah yang dimiliki oleh masing-masing koperasi menunjukkan bahwa kebutuhan akan modal oleh masyarakat Desa Sitarjo sangat besar. Pihak desa diharapkan dapat mendorong masyarakat desa sebagai nasabah yang cerdas. Pinjaman dari koperasi dapat digunakan sebagai modal awal dalam berwirausaha, bukan untuk membeli kebutuhan sehingga menjadi masyarakat yang terlilit oleh hutang. Pelatihan kewirausahaan dianggap sangat penting dan dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Desa Sitarjo.

#### **4.1.4. Infrastruktur**

##### **A. Sarana dan Prasarana Dasar**

Sarana dan prasarana dasar di Desa Sitarjo dalam bidang pendidikan bisa dikatakan sudah memadai. Sarana pendidikan dari Taman Kanak-kanak



(TK) hingga SLTA sudah tersedia. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), bangunan sekolah terletak tersebar di setiap Dusun. Sedangkan untuk bangunan sekolah SLTP dan SLTA terletak di pusat Desa Sitarjo. Kondisi fisik bangunan sekolah formal yang tersedia masih sangat baik.

Jumlah rumah ibadah yang terdapat di Desa Sitarjo sudah dapat memenuhi kebutuhan warga. Jumlah rumah ibadah yang tersedia sesuai dengan populasi pemeluknya. Kondisi rumah ibadah yang tersedia masih sangat baik.

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Desa Sitarjo berupa Puskesmas yang terletak di pusat Desa Sitarjo. Sedangkan Polindes khusus disediakan di Dusun Rowotrate mengingat letaknya yang jauh dari pusat desa serta akses keluar dusun yang harus melewati hutan. Namun berdasarkan Kuesioner yang diisi oleh 50 warga, mengenai akses masyarakat ke Puskesmas sebagian besar menjawab aksesnya tidak terlalu tinggi. Sebagian besar masyarakat Desa Sitarjo lebih memilih ke Bidan atau ke Rumah Sakit di pusat kabupaten apabila ada anggota keluarganya mengalami sakit.

Berdasarkan data profil Desa Sitarjo tahun 2014, sarana dan prasarana listrik yang tersedia di Desa Sitarjo berupa saluran P.L.N. Jumlah rumah penduduk yang telah teraliri listrik sebanyak 1.979 KK. Jumlah tersebut telah menjangkau 68% dari keseluruhan yaitu sebesar 2.924 KK.

Sarana dan prasarana jaringan air bersih di desa Sitarjo terdiri atas berbagai jenis diantaranya: sumur pompa, sumur gali, perpipaan dan mata air. Sejauh ini kondisi sarana prasarana jaringan air bersih di Desa Sitarjo dalam keadaan baik. Namun, kandungan material zat kapur dalam air cukup tinggi sehingga kurang baik untuk konsumsi. Sebagian masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kesehatan lebih memilih membeli air mineral untuk konsumsi sehari-hari.

Berdasarkan data profil Desa Sitarjo tahun 2014, belum terdapat saluran drainase. Di Dusun Rowotrate, saluran drainase terdapat di beberapa titik saja. Kondisinya masih dalam bentuk tanah dan aliran air tidak dapat berjalan karena banyak diantaranya yang tidak tembus (mampat) tertutup tanah, tidak terdapat gorong-gorong dan lain-lain. Pada saat banjir, saluran air menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat karena terus menggenang sehingga berbahaya bagi warga.

Sarana dan prasarana sanitasi lingkungan berupa WC sudah cukup memadai karena sudah terdapat 1.598 buah dengan kondisi baik. Sarana sanitasi WC tersebar merata di semua wilayah Desa. Sementara untuk sarana berupa sumur resapan dan saluran air masih belum tersedia.

#### *B. Sarana dan Prasarana Pendukung*

Infrastruktur pendukung yang tersedia di Desa Sitarjo adalah di bidang ekonomi yaitu terdapat pasar desa. Pasar desa berlangsung dua kali dalam seminggu yaitu setiap hari senin dan kamis. Dalam bidang perdagangan dan jasa, terdapat sarana pendukung diantaranya warung, toko dan kios seperti tercantum pada table diatas. Sarana transportasi darat juga banyak terdapat diantaranya ojek dan angkutan umum.

Sarana dan prasarana pelayanan lingkungan bidang persampahan masih belum tersedia. Adanya kegiatan PDPT Desa Sitarjo mendapat bantuan berupa bak sampah. Namun masalah kebersihan lingkungan belum bisa teratasi karena belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Sitarjo. Masyarakat secara pribadi mengelola sampahnya masing-masing baik dengan membuangnya ke sungai maupun dibakar.

Sarana prasarana bidang kebencanaan masih sangat minim. Sarana yang tersedia adalah tempat pengungsian vertikal yang dibangun setengah jadi. Dalam pembangunannya juga kurang tepat lokasinya sehingga tidak ada



masyarakat yang menggunakan bencana. Adanya Program PDPT tersebut Tim Penanggulangan Bencana Desa Sitarjo. Setelah perkembangannya Tim Desa Sitarjo bekerja sama dengan Tim dari Desa lain apabila terjadi bencana yang tidak terduga sehingga dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan

Mengingat masalah pokok yang sedang dihadapi oleh kawasan pesisir di Indonesia adalah tingginya kerusakan sumber daya pesisir dan rendahnya kualitas infrastruktur desa dan kesehatan lingkungan pemukiman, kondisi infrastruktur Desa Sitarjo sebagian besar juga mengalami kerusakan tersebut. Adanya akses jalan yang masih sangat susah untuk dijangkau menyebabkan distribusi listrik di Desa Sitarjo juga terhambat (Dusun Rowotrate). Program Pengembangan Desa Pesisir tangguh di Desa Sitarjo diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

#### 4.1.5. Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

##### A. Pertanian

Lahan pertanian Desa Sitarjo dibagi menjadi area persawahan dan perkebunan. Area sawah terbagi menjadi dua jenis yaitu sawah setengah teknis dan sawah tadah hujan. Di Desa Sitarjo juga terdapat hutan milik Negara yang pengelolaannya terbagi menjadi dua jenis yaitu hutan lindung dan hutan produksi. Desa Sitarjo memiliki potensi pertanian pangan utama padi. Beberapa jenis tanaman pangan yang dibudidayakan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 11.** Produksi Tanaman Pangan Desa Sitarjo

Komoditas	Luas lahan (ha)	Produksi (Ton)
Padi	374	2.992
Jagung	10	100
Kacang tanah	1	7
Ketela pohon	1	20

Sumber : Profil Desa Sitarjo 2014

Selain pertanian sawah, pertanian perkebunan yang diusahakan masyarakat juga besar seperti pada tabel berikut :

**Tabel 12.** Produksi Tanaman Perkebunan Desa Sitarjo

No	Komoditas	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Nilai (Rp)
1	Rambutan	2	10	30.000.000
2	Pisang	78	780	780.000.000
3	Mangga	1	20	40.000.000
4	Tebu	12	1.440	504.000.000
5	Kelapa	152	912	2.188.800.000

**Sumber : Profil Desa Sitarjo 2014**

Hasil pertanian terutama perkebunan tersebut dijual dalam keadaan sebagai bahan mentah. Sebagian besar masyarakat menjual hasil panen ke pengepul. Informasi pemasaran yang sangat minim membuat mereka sering dihadapkan oleh permainan harga oleh pedagang. Tersedianya bahan baku khususnya untuk komoditas kelapa dan pisang mempunyai peluang besar untuk masyarakat mengembangkan lebih lanjut terutama menjadi industri pengolahan. Namun kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pengolahan bahan-bahan baku sangat kurang, baik dalam teknik pengolahan maupun segi pemasarannya.

Selain pengembangan pengolahan kedua komoditas tersebut, areal perbukitan yang tepat untuk pengembangan buah dengan nilai ekonomi tinggi. Buah-buah yang telah terbukti dapat tumbuh di area tersebut dapat lebih dibudidayakan secara intensif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Beberapa yang telah dilaksanakan adalah pengadaan bibit manggis dan bibit durian. Program pengadaan bibit tersebut bekerja sama dengan beberapa instansi antara lain dinas pertanian pada tahun 2013, Balai Lingkungan Hidup (BLH), dinas Kelautan dan Perikanan melalui program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT).



## B. Ekosistem Pesisir

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, wilayah laut dan pesisir beserta sumber daya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi Indonesia, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Karakteristik dari ekosistem pesisir adalah mempunyai beberapa jumlah ekosistem yang berada di daerah pesisir. Contoh ekosistem lain yang masuk dalam wilayah ekosistem pesisir adalah ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove dapat ditemukan di daerah yang belumpur seperti pada rata-rata pusat, lumpur pasang surut dan eustaria. Pada ekosistem mangrove hidup tumbuhan bermacam-macam dengan spesies yang sangat kaya. Salah satu fungsi dari mangrove sendiri adalah sebagai perangkap sedimen dan mengurangi abrasi.

Mangrove di Desa Sitarjo dapat dikelompokkan menjadi dua lokasi, yaitu di pakisan dan muara sungai. Mangrove yang tumbuh di daerah pakisan merupakan jenis *Bruguiera* spp, sedangkan di muara sungai mangrove yang tumbuh dari jenis *Avicenia* dan *Nypafruticants*. Di pantai datar dan perbukitan juga terdapat tanaman yang biasanya berasosiasi dalam hutan mangrove yaitu pandan laut dan *Nypafruticants*. Terumbu karang di wilayah perairan Desa Sitarjo berada di hampir sepanjang pantai dari bagian Barat (Ungapan) sampai bagian Timur (Clongop). Terumbu karang di perairan Desa Sitarjo juga mengalami kerusakan oleh karena pemakaian bom (dahulu sebelum diberlakukannya pelarangan pemakaian bom ikan) dalam menangkap ikan.

Pantai di Desa Sitarjo berupa dataran rendah dan perbukitan. Pantai dataran rendah dari Barat ke Timur yaitu :

1. Pantai Leter Barat berupa pantai berpasir putih
2. Pantai Leter Timur berupa pantai berpasir putih dan berbatu
3. Pantai Goa Cina Barat dan Timur berupa pantai berpasir putih dan berbatu

4. Pantai Semenggung Barat berupa pantai berpasir putih
5. Pantai Semenggung Timur berupa pantai berpasir putih

Pantai-pantai tersebut (100 meter dari bibir pantai) mengalami degradasi lingkungan. Awalnya kawasan pantai merupakan hutan lebat baik hutan mangrove maupun hutan biasa. Pada tahun 1998 terjadi penggundulan hutan yang merubah fungsi hutan menjadi ladang oleh masyarakat pendatang. Namun karena lokasi lahan di pantai kurang produktif banyak wilayah pesisir pantai yang setelah penggundulan hutan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal menjadi ladang sehingga dibiarkan terbengkalai (gundul).

Pantai berupa perbukitan terdapat di dua titik yaitu di sebelah Barat (Ungapan) dan sebelah Timur (Semenggung). Kedua lokasi perbukitan tersebut juga terdapat degradasi lingkungan. Tanaman hutan bakau berada di sepanjang tepi bukit dengan lebar 1 meter di Ungapan. Sementara hutan tropis juga tersisa sekitar 10% selebihnya telah beralih fungsi menjadi ladang. Perbukitan di pantai Semenggung bahkan seluruhnya sudah beralih fungsi menjadi ladang.

Kondisi muara di ungapan juga mengalami degradasi lingkungan. Mangrove di sepanjang aliran sungai hanya tinggal 1-2 meter saja dari bibir sungai, bahkan banyak diantaranya habis sama sekali dan sudah menjadi ladang yang hanya ditanami pohon pisan yang tidak dapat menyangga tanah. Banyak tepian sungai yang terkikis oleh banjir karena di sepanjang sungai ditanami pohon pisang dan kelapa yang tidak kuat menahan tanah. Muara sungai Desa Sitiarjo juga mengalami sedimentasi. Pada waktu ombak besar, pasir memenuhi area muara sehingga terjadi pendangkalan yang memudahkan terjadinya banjir saat musim hujan tiba. Kondisi perairan di muara selama tidak pada musim penghujan sangat tenang.



### C. Perikanan

Perikanan tangkap di Desa Sitarjo masih sangat sederhana. Nelayan Sitarjo mencari ikan di wilayah terumbu karang dengan memasang jaring gill net. Nelayan Sitarjo belum mempunyai alat tangkap yang memadai untuk dapat memanfaatkan potensi laut yang sangat luas. Selain itu, kondisi pantai Desa Sitarjo memiliki arus dan gelombang tidak mendukung menjadi tempat bersandarnya perahu-perahu nelayan. Dahulu, nelayan menyandarkan perahunya di sungai dekat rumah.

Perikanan budidaya yang berkembang di Desa Sitarjo sangat rendah. Perikanan budidaya yang dilakukan hampir semua dilakukan untuk konsumsi pribadi. Sitarjo merupakan Desa yang rawan bencana merupakan alasan kuat masyarakat enggan untuk melakukan perikanan budidaya. Berdasarkan keterangan masyarakat, di areal rawa besar dahulu digunakan sebagai tambak udang. Akan tetapi karena tidak ada kecocokan antara pemilik usaha dengan warga sekitar, tambak tersebut ditutup pada tahun 2002.

Setelah melihat potensi perikanan yang ada di Desa Sitarjo, berdasarkan Laporan Kebijakan ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru (2012), secara umum arah strategi pengembangan ekonomi sektor perikanan adalah membangun sektor perikanan yang optimal, lestari, bernilai tambah dan beraya saing. Lebih lanjut, pembangunan bidang perikanan sebagai bagian dari program revitalisasi ekonomi nasional diarahkan pada empat langkah utama yaitu (1) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan penguatan lembaga pendukungnya, (2) pengamanan ketahanan pangan khususnya dalam konteks suplai protein yang berasal dari sumberdaya ikan, (3) peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk perikanan, dan (4) peningkatan upaya diversifikasi produk perikanan dalam rangka meningkatkan nilai tambahnya. Setelah penjabaran dari arah strategi tersebut diperlukan upaya-

upaya berupa implementasi bisnis sektor perikanan dengan model *Blue Economy*.

Mengingat kondisi laut Desa Sitarjo yang memiliki arus dan gelombang sangat tinggi, pengelolaan potensi sektor perikanan dapat ditekankan pada pengolahan produk perikanan. Pengolahan produk perikanan diharapkan dapat menggunakan konsep *Blue Economy* dimana limbah keluaran yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan baku industri lainnya (nol limbah).

#### D. Pariwisata

Pariwisata pantai yang sudah berkembang di Desa Sitarjo adalah pantai Goa Cina (dapat dilihat pada gambar 18). Masyarakat berkunjung ke pantai Goa Cina untuk melihat pemandangan pantai yang indah. Pemandangan pantai Goa Cina cukup indah karena terdapat beberapa pulau kecil dari ujung Barat (Ungapan) sampai Timur (Semenggung). Periran di pesisir memiliki angin dan arus yang cukup deras sehingga masyarakat hanya bisa bermain air di tepi pantai saja. Sementara bagi wisatawan asing yang memiliki hobi selancar justru mencari ombak yang cukup besar untuk bisa berselancar. Masyarakat umum banyak juga yang biasanya memancing di beberapa spot terumbu karang di pantai bagian barat.

Masih banyak pantai di Desa Sitarjo dengan pemandangan yang sangat indah belum dikembangkan sebagai potensi wisata (dapat dilihat pada gambar 19 dan gambar 20). Namun area-area yang sesuai untuk pengembangan wisata bahari tersedia dan sudah terdapat respon positif dari masyarakat yang dapat mendorong tumbuhnya wisata bahari selam, memancing, surfing dan lain-lain. Di pesisir pantai ujung Barat topografi berupa perbukitan dan dataran yang cukup luas memiliki potensi sebagai area wisata terbatas. Selain cocok untuk konservasi penyu, pantai Watu Leter (gambar 20) juga cocok untuk area perkemahan, *hiking dan outbond*.





**Gambar 19.** Pariwisata yang sudah dikembangkan Desa Sitarjo “Pantai Goa Cina”



**Gambar 20.** Potensi wisata yang belum dikembangkan “Pantai “Semenggung”



**Gambar 21.** Potensi wisata yang belum dikembangkan ‘Pantai Watu Leter’

Selain terjadi degradasi alam, muara sungai Ungapan memiliki potensi sumberdaya ikan yang cukup besar yaitu kepiting, ikan gabus dan gating (sidat) potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. selain kaya akan sumberdaya ikan, sungai Ungapan juga memiliki pemandangan yang indah. Sungai cukup lebar dan dalam sampai sejauh 2 km memiliki potensi sebagai kawasan wisata sungai. Keberadaan jembatan di atas sungai ini, juga mempercantik pemandangan.

Di Dusun Rowotrate terdapat dua lahan rawa yang dikelilingi oleh lahan persawahan yang luas. Persawahan tersebut sangat rentan terhadap curah hujan. Pada musim hujan, lahan tersebut dapat terendfam hampir 70%. Hujan semalam saja sudah berakibat padi terendam cukup tinggi. Pada musim kemarau, lahan tersebut mengalami kekeringan dan masyarakat tidak dapat mengalirinya dengan air sungai karena air payau. Seringkali masyarakat mengalami gagal panen baik pada musim penghujan, maupun musim kemarau. Lahan rawa mempunyai potensi sebagai tanggul penampung air hujan untuk menunjang produktivitas pertanian padi dan perikanan air tawar. Selain itu sumberdaya ikan yang cukup besar juga memiliki potensi sebagai wisata kolam pemancingan dengan konsep "Rest Area". Dengan dikelilingi pemandangan perbukitan dan persawahan yang luas dan indah akan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat yang berlalu lintas di JLS (Jalur Lintas Selatan). Lokasi rawa besar berada persis di pinggir perlintasan JLS sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat.

Berdasarkan Laporan Kebijakan ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan Model Ekonomi Biru (2012), wisata bahari merupakan salah satu bidang dalam pembangunan kelautan Indonesia yang memiliki potensi besar, karena ditunjang dengan banyaknya pulau-pulau yang dimiliki Indonesia dan belum

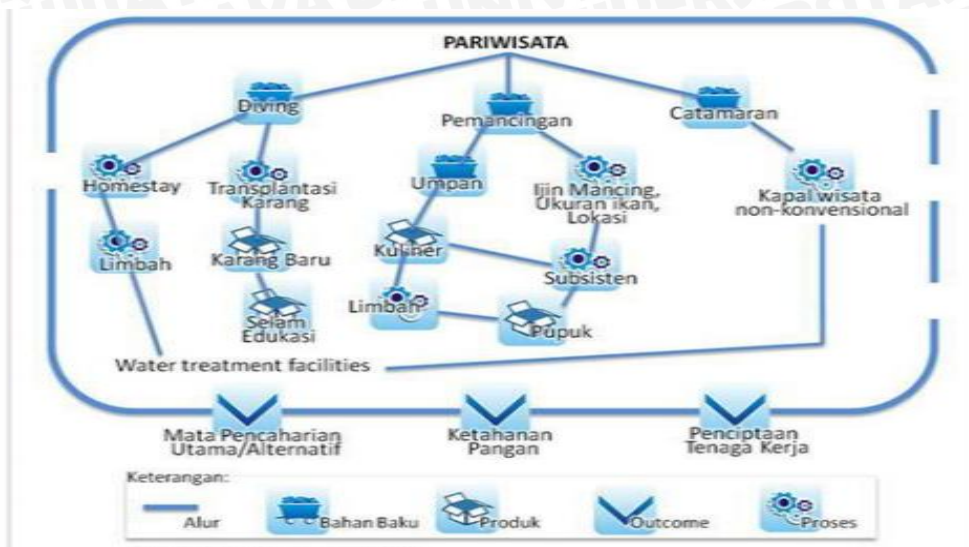


dimanfaatkan secara optimal. Secara umum, arah strategi pengembangan ekonomi Sektor Wisata Bahari adalah mengembangkan wisata bahari Indonesia yang terpadu dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi kelompok 10 besar tujuan wisata dunia dan meningkatkan pengembangan wisata nusantara yang mampu menjaga integritas budaya nasional, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal serta dikelola secara berkelanjutan. Strategi pengembangan ekonomi sektor wisata bahari dengan model Ekonomi Biru di Indonesia dapat dicapai dengan langkah-langkah utama sebagai berikut :

- a. mengembangkan industri pariwisata bahari berbasis ekosistem yang berkelas dunia.
- b. membangun sistem wisata bahari yang terpadu dengan sistem kepelabuhanan dan transportasi nasional.
- c. mengembangkan sistem pelayanan wisata bahari satu pintu (*single window*).

Kemudian, untuk penjabaran dari arah strategi tersebut diperlukan upaya-upaya berupa implementasi bisnis sektor pariwisata bahari dengan model *Blue Economy* (Ekonomi Biru). Keindahan alam laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata potensial di Indonesia. Wisata bahari merupakan rangkaian aktifitas terkait dengan aktifitas seperti olahraga selam/ *diving* dan *snorkeling*, olahraga berselancar, olahraga pantai, serta wisata yang berbasis konservasi lingkungan laut seperti penanaman mangrove, transplantasi terumbu karang dan lain-lain. Contoh implementasi pengembangan bisnis sektor wisata bahari dengan konsep *Blue Economy* adalah pengembangan kawasan pemukiman pesisir yang ramah lingkungan, sistem pengelolaan limbah yang mampu menghasilkan keluaran sebagai sumber energi baru bagi kawasan (biogas), sistem aliran air laut, penanaman mangrove yang sekaligus sebagai media hidup hayati laut dan pesisir dan lain-lain. Contoh

implementasi pengembangan bisnis sektor kelautan dan perikanan dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini :



**Gambar 22.** Contoh Implementasi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Melihat banyaknya potensi wisata yang dimiliki Desa Sitarjo yang belum dikelola dengan maksimal, contoh implementasi di atas diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuka potensi wisata namun tetap menjaga keberlanjutan ekosistem yang ada di dalamnya.

#### E. Industri Maritim

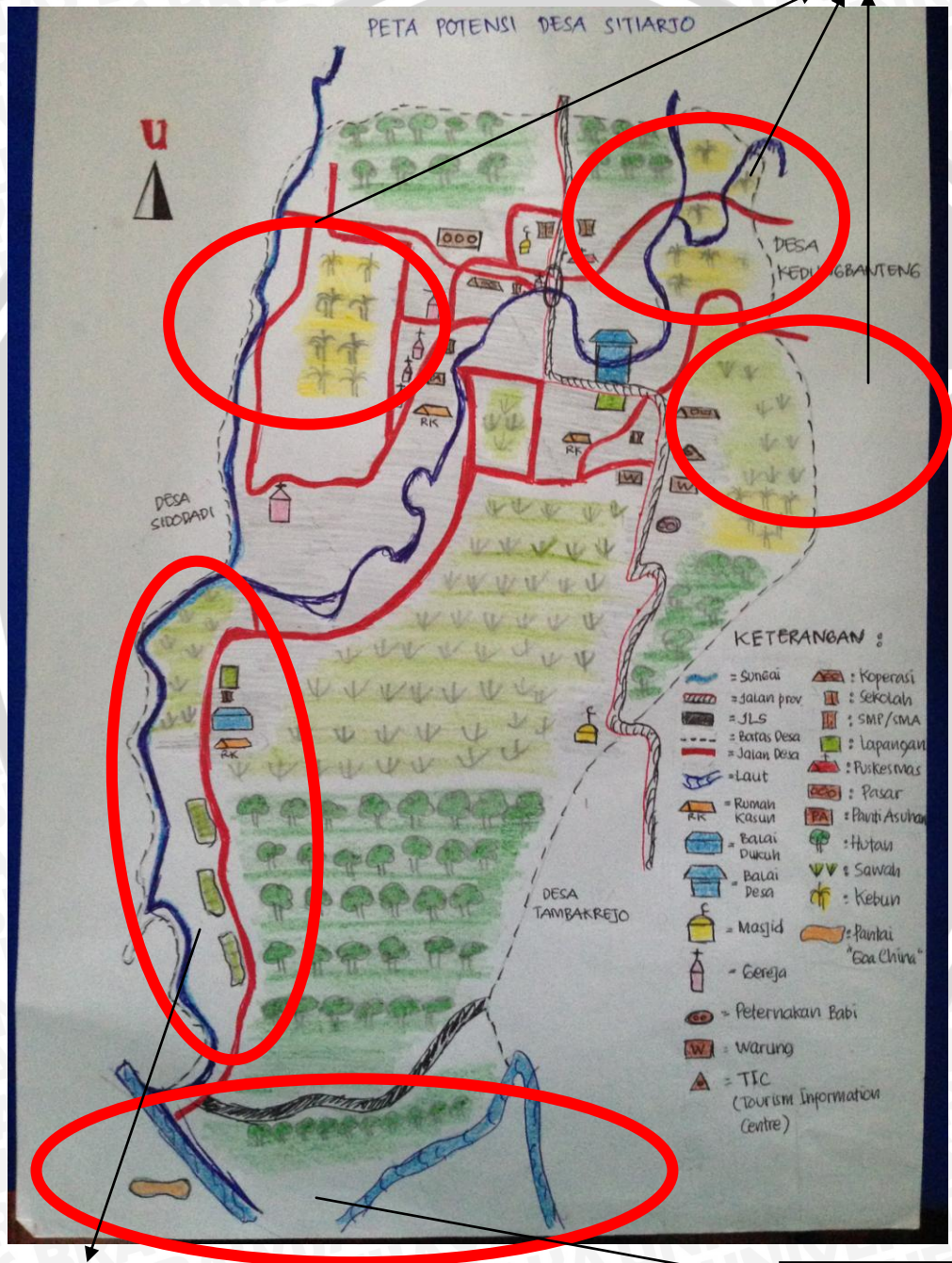
Industri pengolahan produk perikanan belum terdapat di Desa Sitarjo. Keberadaannya berbanding lurus dengan perikanan laut yang masih sangat terbatas dan belum mendapat pembinaan dari pihak terkait. Potensi pengembangan perikanan yang dapat menunjang industri maritim di Desa Sitarjo adalah pengembangan perikanan tangkap. Berdasarkan kondisi topografi perairan yang ada, potensi pengembangan di bidang penangkapan adalah pengembangan perikanan tangkap ikan-ikan karang. Potensi besar yang dimiliki desa Sitarjo untuk menunjang industri perikanan adalah pengembangan budidaya baik di sungai maupun area mangrove. Lokasi berada di Pakisan



seluas 30 ha serta muara sungai Ungapan. Selain area yang cukup luas, kedua lokasi juga keberadaan sumberdaya benih yang melimpah akan sangat menunjang.

Peta Potensi (*mapping*) Desa Sitarjo hasil dari observasi peneliti selama berada di Desa Sitarjo adalah sebagai berikut :

POTENSI PERTANIAN



Potensi wisata susur sungai

Gambar 23. Peta Potensi Desa Sitarjo

Potensi wisata bahari Desa Sitarjo

## 4.2 Isu-Isu dan Masalah Mendesak

Terkait tujuan penelitian yang kedua yaitu mengetahui dan memahami masalah paling mendesak yang dihadapi oleh masyarakat Sitarjo peneliti memberikan contoh beberapa isu-isu yang terjadi di Desa Sitarjo. Isu-isu yang terjadi di Desa Sitarjo adalah sebagai berikut :

### 4.2.1. Isu-Isu Utama

#### A. Degradasi Lingkungan

Wilayah pesisir Desa Sitarjo mengalami degradasi lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Diketahui bahwa wilayah pesisir Desa Sitarjo dibatasi oleh muara Ungapan sebelah Barat dan Clongop di sebelah Timur. kedua muara tersebut merupakan tempat tumbuhnya mangrove. Banyak jenis Mangrove yang dapat tumbuh dengan baik di dua muara tersebut.

Terumbu karang di wilayah perairan Dsea Sitarjo berada di hampir sepanjang pantai dari bagian Barat (Ungapan) sampai bagian Timur (Clongop). Kondisi terumbu karang di Dsea Sitarjo juga cukup mengkhawatirkan. Banyak terumbu karang yang mengalami kerusakan parah akibat pemakaian bom (sebelum diberlakukan peraturan perundangan tentang pemakaian bom) dalam menangkap ikan. Namun saat ini terumbu karang di Desa Sitarjo 50% dalam keadaan baik. Pihak Desa dan masyarakat sedang berusaha untuk mengembalikan ekosistem terumbu karang dengan cara inplantasi.

Wilayah sempadan pantai (100 meter dari bibir pantai) mengalami degradasi lingkungan. Awalnya, kawasan pantai merupakan hutan lebat baik hutan mangrove maupun hutan biasa. Pada tahun 1998 terjadi penggundulan hutan oleh masyarakat pendatang yang merubah fungsi hutan menjadi ladang. Namun karena lahan di sekitar pantai kurang produksi, masyarakat membiarkan lahan pesisir terbengkalai.



Pantai berupa perbukitan di sebelah Barat (Ungapan) dan sebelah Timur (Semenggung) juga mengalami degradasi lingkungan. Degradasi meliputi tanaman hutan bakau berada di sepanjang tepi bukit dengan lebar 1 meter di Ungapan. Selebihnya telah beralih fungsi menjadi ladang. Perbukitan di pantai Semenggung bahkan seluruhnya sudah beralih fungsi menjadi ladang.

Kondisi muara di Ungapan juga mengalami degradasi lingkungan. Mangrove yang tumbuh di sepanjang aliran sungai kini hanya tinggal 1-2 meter saja dari bibir sungai, bahkan diantaranya banyak yang habis sama sekali dan sudah menjadi ladang yang hanya ditanami pohon pisang yang tidak dapat menyanggah tanah sehingga banyak tepian sungai yang terkikis oleh banjir. Muara sungai juga mengalami sedimentasi. Pada waktu ombak besar, pasir memenuhi muara bahkan sampai bisa tertutup total dari laut. Namun pada musim penghujan, air sungai yang cukup besar membawa material pasir tersebut ke laut. Area muara Ungapan terlindungi oleh bukit sehingga angin laut maupun arus dari air laut tidak memberikan pengaruh. Kondisi perairan di muara selama tidak musim penghujan sangat tenang. Wilayah daratan dan perbukitan setelah sempadan pantai juga telah menjadi lahan persawahan dan ladang masyarakat terutama ditanami pohon pisang. Kondisi di atas dapat dilihat pada gambar 23 dan gambar 24.



**Gambar 24.** Hutan di perbukitan yang beralih fungsi



**Gambar 25.** Kerusakan Hutan mangrove di muara dan pantai

#### *B. Pencemaran*

Pencemaran lingkungan di Desa Sitarjo terutama berasal dari limbah rumah tangga dan pasar. Limbah berupa sampah tersebut belum dikelola dengan baik oleh masyarakat. belum adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Desa Sitarjo menyebabkan masyarakat yang masih memiliki lahan pekarangan di belakang rumah membuang sampah disana dan membakar sampah-sampah tersebut. Penduduk yang tinggal di Dusun Krajan Tengah (sekitar pasar) dan Krajan Wetan banyak yang tidak memiliki pekarangan di belakang rumah sehingga banyak diantaranya yang membuang sampah di selokan dan sungai (sekitar jembatan). Sampah dari pasar jumlahnya cukup besar, setiap hari sampah tersebut dibuang langsung ke sungai. Pada musim penghujan sampah-sampah tersebut dapat segera hanyut terbawa aliran ke laut, sedangkan pada musim kemarau sampah tersebut akan menumpuk sehingga menimbulkan pemandangan dan bau yang tidak sedap. Pencemaran yang terjadi dapat dilihat pada gambar 26.





**Gambar 26.** Sampah dari pasar dan sampah rumah tangga dibuang di sungai yang bermuara di laut

### *C. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim*

Pesisir Desa Sitarjo juga merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana tsunami. Penduduk yang bermukim di pesisir berjumlah 40 kepala keluarga. Mereka tinggal menyebar dari pinggir pantai sampai pedalaman. Masyarakat yang bermukim di smepadan pantai sangat rentan pada bencana tsunami. Keberadaan pulau-pulau kecil di pesisir pantai dapat menjadi benteng tsunami, namun masih dibutuhkan pelindung lain terutama pohon-pohon di pantai yang saat ini kondisinya gundul. Lingkungan pesisir desa Sitarjo tidak memiliki infrastruktur pelindung pantai karena belum pada posisi kritis pada bencana laut. Selain itu, jumlah masyarakat yang bermukim di tepi pantai juga sangat sedikit. Dibutuhkan pohon pelindung untuk melindungi pantai dari bencana tsunami.

Desa Sitarjo merupak wilayah yang sangat rentan pada bencana banjir dan perubahan iklim. Topografi desa yang berada di lembah membuat desa ini sangat rentan terhadap banjir. Sebagai desa yang ekonominya bertumpu pada pertanian keberadaan hujan sangat penting. Keberadaan tanggul yang rusak menyebabkan sawah-sawah banyak yang tidak teraliri air irigasi. Sebagian besar lahan sawah juga merupakan sawah tadah hujan. Musim hujan yang tidak dapat

ditebak membuat masyarakat harus lebih cermat memperhitungkan waktu menanam.

Di Dusun Rowotrate terdapat dua lahan rawa yang dikelilingi oleh lahan persawahan yang luas. Persawahan tersebut sangat rentan terhadap curah hujan. Pada musim hujan lahan tersebut dapat terendam hampir 70%. Hujan semalam saja sudah berakibat padi terendam cukup tinggi. Pada musim kemarau, lahan tersebut mengalami kekeringan dan masyarakat tidak dapat mengalirinya dengan air sungai karena air payau. Seringkali masyarakat mengalami gagal panen baik pada musim penghujan maupun musim kemarau.

#### **4.2.2. Isu-Isu Sosial-Budaya**

##### *A. Tingkat pengangguran*

Berdasarkan data profil Desa Sitarjo tahun 2014, jumlah penduduk usia 15—55 tahun yang belum memiliki pekerjaan (pengangguran) sebesar 489 orang. Jumlah tersebut merupakan 9% dari angkatan kerja yang ada. Jumlah tersebut dikatakan cukup tinggi mengingat masih banyak juga masyarakat yang memiliki pekerjaan tidak tetap. Banyak diantara pengangguran tersebut adalah mereka yang sudah tidak lagi sekolah dan sulit mencari pekerjaan di kota. Di Desa mereka membantu orang tua di sawah dan ladang sekedarnya. Bagi yang tidak memiliki lahan sawah dan ladang keadaan tersebut menjadi lebih sulit lagi.

##### *B. Konflik Sosial*

Desa Sitarjo memiliki keragaman suku dan agama. Suku yang bermukim di Desa Sitarjo berasal dari suku Jawa dan Madura. Mayoritas penduduk Desa Sitarjo memeluk agama Kristen, sedangkan pemeluk agama Islam biasanya suku Madura yang merupakan masyarakat pendatang. Konflik sosial yang saat ini berkembang adalah mengenai pengelolaan kawasan pariwisata pantai Goa Cina. Terdapat banyak kepentingan dari pihak Perhutani, oknum pengelola wisata, dengan pihak desa dan masyarakat Sitarjo. Terdapat demo di Goa Cina oleh



warga Dusun Rowotrate pada oknum pengelola (LKDPH) berkaitan dengan pemanfaatan kayu hutan untuk kepentingan sosial. Namun kerusuhan tersebut tidak sampai menelan korban. Sampai saat ini pengelolaan kawasan wisata Goa Cina masih menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh pihak-pihak terkait yaitu pemerintah desa, Perhutani dan lembaga pengelola wisata (LKDPH).

#### *C. Penyakit Masyarakat*

Berdasarkan data dari RPJM Desa Sitarjo, jumlah masyarakat yang terserang penyakit relative tinggi. Adapaun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pemapasan akut bagian atas, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi penyembuhan cukup lama, yang disebabkan diantaranya oleh cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Hal ini tentu dapat mengurangi daya produktivitas masyarakat Dsea ssitarjo secara umum.

#### *D. Prasarana Sosial*

Prasarana sosial berkaitan dengan kebencanaan yang telah ada di Desa berupa plenggrongan (tempat pengungsian) dapat dilihat pada gambar 26. Tempat pengungsian tersebut berupa bangunan permanen yang masih setengah jadi. Bangunan tersebut merupakan hibah dari lembaga sosial keagamaan (Yayasan Kristen). Proses perencanaan yang kurang matang dan kurang melibatkan masyarakat setempat menyebabkan bangunan tersebut kurang dimanfaatkan oleh masyarakat karena lokasi yang tidak terjangkau saat terjadi bencana banjir.

Sistem peringatan dini bencana banjir yang sudah berjalan selama ini menggunakan HP. Masyarakat di desa atas mengirim sms apabila ketinggian air menunjukkan gejala banjir. Seringkali ketinggian air di sungai masih dalam

kondisi normal dan tidak ada hujan yang turun. Pada saat yang sama , masyarakat meninggalkan aktifitasnya dan bergegas pulang untuk mengungsi harta benda yang berharga.

Pengalaman bencana banjir selama bertahun-tahun membuat pengalaman berharga bagi masyarakat dalam mengatasi bencana secara mandiri. Beberapa diantara masyarakat yang mampu membangun rumah tingkat tetapi sebagian besar masyarakat hanya mampu membuat pengungsian sederhana yaitu di palfon rumah. Dari segi keselamatan, bentuk pengungsian tersebut dapat membahayakan masyarakat karena ketinggian air pada saat banjir tidak dapat diperkirakan. Alat-alat evakuasi dan regu evakuasi selama ini belum mampu memberikan pertolongan seperti yang diharapkan masyarakat.



**Gambar 27.** Tempat pengungsian warga yang kurang optimal pemanfaatannya

### 4.2.3. Isu-Isu Ekonomi

#### A. Status pemanfaatan sumberdaya

Pemanfaatan sumberdaya terdiri atas dua jenis yaitu lahan pribadi (hak milik pribadi) dan lahan Perhutani. Lahan Perhutani dimanfaatkan masyarakat sebagai ladang dan perkebunan sebagai kompensasi masyarakat membayar pajak pada Perhutani. Teknologi pertanian yang digunakan masyarakat masih merupakan pengetahuan yang turun-temurun dari orang tua mereka.



Keberadaan penyuluh petani belum dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat. masyarakat belum terbuka pemikirannya untuk menerapkan pola pertanian yang baru karena kurangnya pemahaman.

#### *B. Konflik pemanfaatan sumberdaya*

Konflik pemanfaatan sumberdaya dan jasa terjadi antara pihak desa dengan Lembaga Kemitraan Desa Pengelola Hutan (LKDPH) yang berada di bawah naungan Perhutani. LKDPH sebagai pengelolaan kawasan wisata Goa Cina tidak memberikan kontribusi pada kas desa seperti yang seharusnya (MOU pengelolaan wisata Goa Cina). Sejauh ini pihak Desa Sitarjo belum dapat berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

#### *C. Infrastruktur pendukung ekonomi*

Perekonomian masyarakat Desa Sitarjo berbasis pada pertanian dan perdagangan hasil pertanian. Infrastruktur pendukung kegiatan pertanian sawah dan kebun di tiga dusun (Krajan Wetan, Krajan Tengah dan Krajan Kulon) relatif cukup baik. Sarana jalan utama (Dusun Rowotrate menuju JLS) merupakan jalur penunjang pertanian dan merupakan akses ke laut kondisinya berupa jalan macadam 50% dan sisanya berupa jalan tanah.

Pada musim penghujan, masyarakat tidak dapat melintasi jalan tersebut karena licin. Masyarakat harus memutar tiga kali lipat (15km) melalui Sendangbiru apabila ingin mencapai lahan pertanian di area rowo dan laut, maupun penduduk Tumpak Awu (RW 09) yang ingin ke pusat desa. Kondisi tersebut terutama sangat menghambat anak-anak yang hendak pergi ke sekolah.

Dari segi perikanan, akses yang sulit menuju laut membuat masyarakat terhambat untuk dapat berperan banyak dalam pengelolaan potensi yang ada di pesisir. Untuk dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola potensi pesisir dan laut, akses jalan tersebut menjadi sayarat utama. Selain itu, nilai strategis jalan dsusun ini adalah fungsinya yang vital sebagai jalan sirip yang

jauh lebih efektif bagi masyarakat umum untuk dapat menuju kawasan pesisir selatan.

#### 4.2.4. Masalah Mendesak

Setelah diketahui beberapa isu yang ada di Desa Sitarjo peneliti melanjutkan pendataan terhadap beberapa warga Desa Sitarjo untuk persiapan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD). Warga Desa Sitarjo yang terlibat dalam FGD merupakan perwakilan dari seluruh organisasi, komunitas dan profesi yang ada di Desa Sitarjo. Setelah melakukan FGD dengan jumlah 40 responden akhirnya didapatkan 10 masalah yang dianggap mendesak oleh masyarakat Desa Sitarjo. Adapun 10 masalah tersebut yaitu :

1. Tingginya pencemaran berupa sampah karena belum adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
2. Terjadinya degradasi lingkungan
3. Adanya over-eksploitasi sumber daya alam
4. Abrasi pantai
5. Perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya
6. Bencana alam ( Banjir dan tanah longsir)
7. Akses jalan dalam keadaan rusak (Dusun Rowotrate)
8. Sering terjadi pemadaman listrik
9. Semakin berkurangnya sumber air bersih
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan

Setelah mendapatkan beberapa masalah yang dianggap mendesak, warga dalam FGD memberikan skor untuk menentukan 1 (satu) masalah yang dianggap prioritas atau paling mendesak. Penentuan masalah yang paling mendesak ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan rencana aksi masyarakat Desa Sitarjo yang akan dijawab dalam tujuan ke tiga



penelitian ini. Pemberian skor dalam menentukan masalah yang paling mendesak peneliti menggunakan analisis prioritas masalah.

Dalam mengidentifikasi masalah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kemampuan sumber daya manusia, biaya, tenaga, teknologi dan lain-lain. Untuk itu, dilakukan penilaian prioritas masalah dari masalah yang paling mendesak hingga tidak terlalu mendesak. Dalam menentukan prioritas masalah peneliti menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan mempertimbangkan tiga komponen dalam metode USG.

#### 1. *Urgency*

Berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan maka semakin tinggi urgensi masalah tersebut.

#### 2. *Seriousness*

Berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian bagi organisasi seperti dampaknya terhadap produktivitas, keselamatan jiwa manusia, sumberdaya atau sumber dana. Semakin tinggi dampak masalah tersebut terhadap organisasi maka semakin serius masalah tersebut.

#### 3. *Growth*

Berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Suatu masalah yang cepat berkembang tentunya makin prioritas untuk diatasi permasalahan tersebut.

Untuk mengurangi tingkat subyektivitas dalam menentukan masalah yang paling mendesak, maka perlu menetapkan kriteria untuk masing-masing unsur USG tersebut. Umumnya digunakan skor dengan skala tertentu, yakni

penggunaan skor skala 1-5. Semakin tinggi tingkat USG tersebut, maka semakin tinggi skor untuk masing-masing unsur tersebut.

Dalam menentukan masalah yang paling mendesak dengan metode USG ini, peneliti bersama warga Desa Sitarjo dalam FGD yang dilakukan di Balai Desa Sitarjo kecamatan Sumbermanjing Wetan pada Hari Kamis, 05 Maret 2015 setelah kegiatan Penyampaian Visi dan Misi terkait kegiatan PILKADES. Berikut hasil pemberian skor masyarakat Desa Sitarjo dalam FGD untuk 10 masalah yang dianggap mendesak :

**Tabel 13.** Analisis Masalah Prioritas

No	Masalah	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Total skor	Rangking prioritas
1	<b>Tingginya pencemaran berupa sampah karena belum adanya TPA (Tempat Pembuangan Akhir)</b>	5	3	5	13	III
2	Terjadinya degradasi lingkungan	5	3	4	12	
3	Adanya Over-eksploitasi sumber daya alam	3	3	5	11	
4	Abrasi pantai	1	2	2	5	
5	<b>Perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya</b>	5	5	5	15	I
6	<b>Bencana alam (banjir dan tanah longsor)</b>	5	5	4	14	II
7	Akses jalan masih dalam keadaan rusak	4	3	3	10	
8	Sering terjadi pemadaman listrik	2	5	2	9	
9	Semakin berkurangnya sumber air bersih	2	5	5	12	
10	Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan	4	5	3	12	

Keterangan : Berdasarkan Skor Likert (5 = Sangat Mendesak, 4= Mendesak, 3= Cukup Mendesak, 2= Kurang Mendesak, 1= Tidak Mendesak)



Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masalah yang sangat mendesak menurut masyarakat Desa Sitarjo diantara masalah yang mendesak adalah perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya. Hal ini mengingat sebagian besar kawasan Desa Sitarjo merupakan hutan lindung. Terjadinya kerusakan hutan di wilayah Desa Sitarjo dan di luar kawasan Desa Sitarjo memberikan dampak yang besar bagi Desa Sitarjo. Banjir dan tanah longsor seakan menjadi rutinitas yang terjadi di Desa Sitarjo. Selain letak topografi Desa Sitarjo yang relative rendah, penggundulan hutan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir yang sangat parah. Alasan inilah yang mendasari Warga Sitarjo yang ikut serta dalam FGD sepakat menjadikan masalah Perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya sebagai masalah yang paling mendesak dan harus segera diatasi.

Masalah yang menjadi topik bahasan pada FGD adalah masalah yang muncul dari masyarakat Desa Sitarjo (pendekatan komunitas). Jika dilihat dari beberapa masalah di atas hampir tidak ada permasalahan mengenai permasalahan wilayah pesisir. Hal ini disebabkan lokasi wilayah pesisir Desa Sitarjo yang letaknya jauh dari pusat desa. Masyarakat Desa Sitarjo sebagian besar tinggal di wilayah yang jauh dengan wilayah pesisir,. Namun demikian, adanya perubahan fungsi hutan lindung di Desa Sitarjo juga memberikan dampak pada kondisi lingkungan wilayah pesisir (permasalahan hulu hingga hilir). Penyelesaian masalah prioritas mengenai perubahan fungsi hutan lindung di Desa Sitarjo diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan wilayah pesisir di Desa Sitarjo.

#### **4.3 Rencana Aksi Masyarakat**

Masalah yang dianggap sangat mendesak dan harus segera diatasi oleh masyarakat Desa Sitarjo adalah perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya menjadi acuan para stakeholder dalam menyusun

rencana aksi masyarakat Desa Sitarjo. Hal ini merupakan tujuan ke tiga dari penelitian ini yakni untuk menyusun rencana aksi masyarakat Desa Sitarjo dalam Pengembangan Desa Pesisir Tangguh. Selain masalah prioritas kedekatan lembaga di Desa Sitarjo dengan masyarakat wajib untuk diketahui, dengan mengetahui lembaga atau organisasi apa yang dekat dengan masyarakat Sitarjo akan mempermudah pelaksanaan rencana aksi tersebut.

#### 4.3.1 Kedekatan Lembaga

Untuk melihat kedekatan masyarakat Desa Sitarjo dengan lembaga yang ada, peneliti menggunakan *preference ranking* pada lembaga dengan output berupa diagram Venn. Hal awal yang dilakukan peneliti adalah mengetahui apa saja lembaga atau komunitas yang ada di Desa Sitarjo. Berikut adalah lembaga-lembaga dan organisasi/komunitas yang ada di Desa Sitarjo :

**Tabel 14.** Lembaga-lembaga di Desa Sitarjo dan Manfaat Lembaga

No	Nama Lembaga	Manfaat
1	Komunitas Gereja	Besar, sebagai sarana beribadah dan berorganisasi
2	RT/RW	Besar, membantu Pemdes dalam lingkup RT/RW
3	Pemerintah Desa	Besar, melayani masyarakat Desa Sitarjo
4	Kelompok Tani	Besar, wadah aspirasi petani Desa Sitarjo
5	HIPPA	Sedang, wadah aspirasi warga Desa Sitarjo pengguna air
6	GAPOKTAN	Sedang, wadah aspirasi petani Desa Sitarjo
7	RAPI / SAR	Besar, meminimalkan terjadinya banjir dan dampaknya
8	Koperasi	Sedang, berperan dalam simpan pinjam
9	POKMASWAS	Besar, menjaga kelestarian dan keberlangsungan lingkungan
10	Kelompok Nelayan	Sedang, wadah aspirasi nelayan Desa Sitarjo
11	Komunitas Pedagang Ikan	Sedang, wadah aspirasi pedagang ikan Desa Sitarjo
12	PKK	Sedang, wadah aspirasi ibu-ibu Desa Sitarjo
13	BPD	Sedang, sebagai mitra pemerintah desa
14	LPMD	Sedang, sebagai mitra pemerintah desa
15	TK=RA	Sedang, sebagai sarana pendidikan
16	SD=MI	Sedang, sebagai sarana pendidikan
17	SLTP	Sedang, sebagai sarana pendidikan
18	SLTA	Sedang, sebagai sarana pendidikan
19	Komunitas masjid	Kecil, untuk silaturahmi umat muslim Desa Sitarjo
20	KOPWAN	Kecil, untuk sarana simpan pinjam wanita (istri) perangkat desa

**Sumber : Profil Desa Sitarjo 2014**

Selanjutnya responden pada FGD diminta untuk meranking 5 lembaga atau organisasi yang dianggap sangat dekat dan dipercaya. Lembaga terdekat



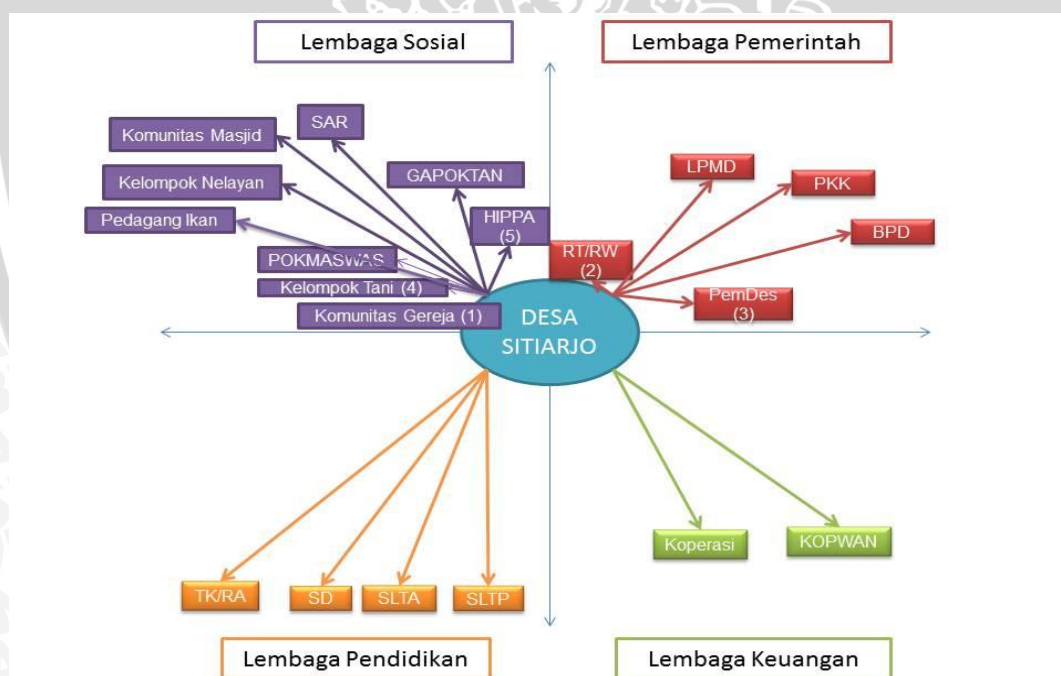
dan sangat dipercaya dapat dilihat dari banyaknya jumlah responden yang meranking. Detail penilaian responden terhadap lembaga atau organisasi yang dipilih dapat dilihat pada lampiran 1.

Lembaga terdekat yang diranking oleh responden dapat dilihat pada tabel 15.

**Tabel 15.** Lembaga Terdekat Pilihan Responden

Ranking/ Lembaga	Ranking 1	Ranking 2	Ranking 3	Ranking 4	Ranking 5
Komunitas	<b>29</b>	7	1	1	
Gereja	<b>Responden</b>	Responden	Responden	Responden	
RT/RW	3	<b>21</b>	8	3	2
Pemerintah	Responden	<b>Responden</b>	Responden	Responden	Responden
Desa		7	<b>14</b>	4	5
Kelompok		Responden	<b>Responden</b>	Responden	Responden
Tani	1	2	5	<b>15</b>	5
HIPPA	Responden	Responden	Responden	<b>Responden</b>	Responden
GAPOKTAN		1	3	5	<b>15</b>
SAR		Responden	Responden	Responden	<b>Responden</b>
Koperasi		1	1	1	2
POKMASWAS		Responden	Responden	Responden	Responden
Kelompok	2	1	2	4	
Nelayan	Responden	Responden	Responden	Responden	2
Pedagang	1		1	1	Responden
Ikan	Responden		1	1	1
PKK			1	4	Responden
BPD			Responden	1	1
LPMD	2			Responden	Responden
TK/RA	Responden				2
SD/MI					Responden
SLTP					Responden
SLTA					Responden
Komunitas	2				
Masjid	Responden				
Koperasi			1		3
Wanita			Responden		Responden

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kedekatan lembaga dengan masyarakat Desa Sitarjo dengan lembaga yang di anggap paling dekat (ranking 1) adalah Komunitas Gereja dengan jumlah responden yang memilih sebanyak 29 responden. Lembaga selanjutnya yang dianggap dekat dan dipercaya setelah komunitas gereja (ranking 2) adalah RT/RW dengan jumlah responden yang memilih sebanyak 21 responden, ranking 3 adalah Pemerintah Desa dengan jumlah responden sebanyak 14 responden, ranking 4 adalah Komunitas kelompok tani dengan jumlah responden sebanyak 15 responden dan ranking 5 adalah HIPPA (Himpunan Pengguna Air) dengan jumlah responden sebanyak 15 responden . Untuk mempermudah melihat kedekatan lembaga, organisasi atau komunitas dengan masyarakat desa Sitarjo peneliti menggunakan diagram Venn seperti berikut :



**Gambar 28.** Diagram Venn Kedekatan lembaga Desa Sitarjo versi peneliti

Komunitas gereja merupakan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sitarjo yang dianggap paling dekat dengan masyarakat. hal ini tidak lepas



karena hampir seluruh masyarakat Desa Sitarjo beragama Kristen. Komunitas Gereja di Desa Sitarjo memiliki struktur organisasi yang cukup bagus. Semua kegiatan masyarakat Desa Sitarjo berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan komunitas gereja. Desa Sitarjo memiliki banyak gereja, namun semua anggota dari beberapa gereja tersebut semuanya menjadi anggota Komunitas Gereja Desa Sitarjo. Selain berfungsi dalam kegiatan keagamaan, Komunitas gereja Desa Sitarjo sering melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Beberapa contoh kegiatan yang sudah dilakukan komunitas gereja Desa Sitarjo adalah penggemukan hewan ternak (sapi dan babi) milik anggota, permodalan pengembangan ekonomi warga, pengadaan dana sehat abadi untuk anggota yang termasuk dalam struktur organisasi, pengadaan dana pendidikan untuk anak kurang mampu. Komunitas Gereja Desa Sitarjo sudah berkembang sangat besar, hal ini dibuktikan banyaknya anggota komunitas yang banyak dari luar Desa sitarjo. Namun demikian, masyarakat yang dapat masuk dalam kepengurusan organisasi harus masyarakat Desa Sitarjo. Komunitas gereja Desa Sitarjo sangat mengajarkan toleransi dalam beragama. Komunitas Gereja sering mengadakan kegiatan dan berbagai acara yang melibatkan beberapa lembaga ataupun komunitas lain di Desa Sitarjo.

#### 4.3.2 Rencana Aksi

Setelah melakukan analisis atas informasi masalah dan lembaga maka tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan. Responden beserta stakeholder terkait Pengembangan Desa pesisir Tangguh diharapkan mampu membuat jalan keluar dari masalah yang sangat mendesak. Berdasarkan masalah yang sudah diketahui, diharapkan dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai melalui program dan kegiatan yang dirancang. Rencana aksi ini merupakan inti dari beragam jenis pekerjaan yang harus

dilakukan, menentukan orang atau pihak yang bertanggung jawab, sumber daya yang dibutuhkan serta kerangka waktu yang dibutuhkan.

Rencana aksi yang akan dilakukan terkait dengan 3 masalah yang dianggap paling mendesak dan mendapatkan nilai tertinggi oleh responden dalam FGD, yakni :

1. Perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya
2. Terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor)
3. Tingginya pencemaran berupa sampah karena belum adanya Tempat pembuangan Akhir (TPA)

Rencana aksi yang akan dilakukan tidak akan lepas dengan adanya penanggungjawab pelaksana. Pelaksana kegiatan dalam rencana aksi ini bisa melibatkan lembaga, organisasi bahkan individu yang memiliki keterkaitan dalam rencana aksi masyarakat Desa Sitarjo. Berikut 5 lembaga atau organisasi yang dianggap sangat dekat oleh masyarakat Desa Sitarjo :

1. Komunitas Gereja
2. RT/RW
3. Pemerintah Desa
4. Kelompok Tani
5. Himpunan Pengguna Air (HIPPA)

Rencana aksi Desa Sitarjo terkait masalah yang sangat mendesak beserta detail kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel 15.** Rencana Aksi masyarakat Desa Sitarjo

No	Rencana Aksi	Pelaksana	Jangka Waktu Program	Tempat Pelaksanaan	Sumber Dana
1	Melakukan program reboisasi dari kegiatan menanam bibit pohon, proses perawatan hingga proses evaluasi di seluruh hutan lindung yang ada di Desa Sitarjo	Komunitas Gereja (Sumenggaring Budi Leksono Pudyo, Nyudiadji Muntoyoadi )	Pendek (0-5 tahun ke depan)	Hutan lindung milik Desa Sitarjo	Swadaya Masyarakat APBD, APBN. Donatur, BLH, Kehutanan
2	Rehabilitasi daerah yang rawan terkena banjir dan tanah longsor dengan pembuatan tanggul di belakang pemukiman	Perangkat Desa dan Komunitas Gereja (Yudi Purnama Dwi Pudjo Pidekso Sugiyono)	Pendek (0-5 tahun ke depan)	Balai dukuh masing-masing	Swadaya Masyarakat, APBD, APBN, Donatur, Dinas Pengairan
3	Menggalang kepedulian dan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir dan tanah longsor dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tiap dusun di Desa Sitarjo	Pokmaswas, Perangkat Desa dan Komunitas Gereja (Yudi Purnama Dwi Pudjo Pidekso Sugiyono)	Pendek (0-5 tahun ke depan)	Balai dukuh masing-masing	Swadaya masyarakat, APBD, APBN, Donatur, BLH
4	Menggalang kesadaran masyarakat akan bahaya pencemaran dan bahaya membuang sampah ke saluran air dan sungai dengan melakukan kegiatan penyuluhan	Pokmaswas, Perangkat Desa dan Komunitas Gereja (Yudi Purnama Dwi Pudjo Pidekso Sugiyono)	Pendek (0-5 tahun ke depan)	Balai dukuh masing-masing	Swadaya masyarakat, APBD, APBN, Donatur, BLH
5	Membuat tempat pembakaran sampah yang aman dan pelatihan pengolahan sampah organik	Pokmaswas, Perangkat Desa dan Komunitas Gereja (Yudi Purnama Dwi Pudjo Pidekso Sugiyono)	Pendek (0-5 tahun ke depan)	Balai Desa	Swadaya masyarakat, APBD, APBN, donatur, BLH

Berdasarkan tabel rencana aksi di atas diketahui bahwa rencana aksi yang dibuat oleh masyarakat Desa Sitarjo adalah terkait dengan adanya masalah yang dianggap sangat mendesak. Pelaksana dari setiap kegiatan merupakan tokoh masyarakat Desa Sitarjo yang sebagian besar merupakan pengurus dari komunitas gereja Sitarjo (majelis). Pelaksana juga terdiri dari

aparatus pemerintah desa yakni Ketua Dusun di Desa Sitarjo. Hal ini tidak terlepas dari analisis kedekatan lembaga atau organisasi yang dekat dengan masyarakat Desa Sitarjo. Komunitas Gereja merupakan lembaga sosial yang ada di Desa Sitarjo yang dianggap paling dekat oleh masyarakat Desa Sitarjo. Meskipun komunitas Gereja merupakan lembaga sosial yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam menjalankan Program PDPT namun pihak pemerintah desa harus dapat melihat peluang yang akan didapatkan apabila komunitas gereja dapat turut serta dalam menyukseskan program PDPT. Langkah yang harus dilakukan desa adalah memberikan penguatan kapasitas lembaga khususnya lembaga sosial atau kemasyarakatan yang dianggap paling dekat dengan masyarakat mengenai program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh,





## 5. PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Pada penelitian “Profil dan Rencana Aksi Masyarakat Dalam Rangka Gerakan *Blue Economy* Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Jawa Timur” didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Profil Desa Sitarjo yang meliputi kondisi biogeofisik, kondisi sosial-budaya, kondisi ekonomi, kondisi infrastruktur, potensi dan pemanfaatan sumber daya alam menunjukkan bahwa Desa Sitarjo merupakan daerah wilayah pesisir yang memiliki potensi sangat besar di sektor pertanian dan perkebunan. Potensi pesisir Desa Sitarjo belum di manfaatkan dengan optimal karena lokasi wilayah pesisir Desa sitarjo yang jauh dengan pusat desa.
2. Masalah yang dianggap sangat mendesak dan harus segera diatasi menurut masyarakat Desa Sitarjo meliputi :
  - a. Perubahan fungsi hutan lindung menjadi pembangunan lainnya
  - b. Terjadinya bencana alam (banjir dan tanah longsor)
  - c. Tingginya pencemaran berupa sampah karena belum adanya TPA
3. Lembaga atau organisasi yang terdekat keberadaannya dengan masyarakat Desa Sitarjo sehingga memiliki kepercayaan paling tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. Komunitas Gereja
  - b. RT/RW
  - c. Pemerintah Desa
  - d. Kelompok Tani
  - e. Himpunan Pengguna Air (HIPPA)

4. Rencana Aksi masyarakat Desa Sitarjo terkait masalah yang dianggap prioritas dan mendesak adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan program reboisasi dari kegiatan menanam bibit, proses perawatan hingga proses evaluasi di seluruh hutan lindung yang ada di Desa Sitarjo
- b. Rehabilitasi daerah yang rawan banjir dan tanah longsor dengan pembuatan tanggul di belakang pemukiman
- c. Menggalang kepedulian dan kesadaran masyarakat akan bahaya banjir dan tanah longsor dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat tiap dusun di Desa Sitarjo
- d. Menggalang kesadaran masyarakat akan bahaya pencemaran dan bahaya membuang sampah ke saluran air dan sungai dengan melalui kegiatan penyuluhan
- e. Membuat tempat pembakaran sampah yang aman dan pelatihan pengolahan sampah organik

#### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian “Profil dan Rencana Aksi Masyarakat Dalam Rangka Gerakan *Blue Economy* Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) di Desa Sitarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang Jawa Timur” maka dengan ini diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi peneliti diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut kebijakan *Blue economy* berdasarkan temuan penelitian sekarang yaitu berupa masalah mendesak dan solusinya.
2. Komponen-komponen Desa Sitarjo melakukan kerjasama dengan desa sekitar dalam menanggulangi bencana alam (banjir dan tanah longsor) agar dapat memperkecil dampak yang ditimbulkan.



3. KKP selaku pemerintah pusat bidang kelautan dan perikanan bersama seluruh komponen yang ada di Desa Sitarjo dapat memanfaatkan potensi pesisir yang ada dengan bijaksana sehingga permasalahan wilayah pesisir yang ada di Desa Sitarjo dapat terselesaikan.
4. KKP selaku pembuat program PDPT diharapkan memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan terhadap lembaga-lembaga yang dianggap sangat dekat dipercaya oleh masyarakat terkait pelaksanaan Program PDPT di Desa Sitarjo.
5. KKP selaku pembuat program PDPT diharapkan juga memberikan peningkatan kapasitas kelembagaan terhadap lembaga yang dianggap tidak dekat agar menjadi dekat dengan masyarakat (*Capacity Building*) sehingga semua lembaga atau organisasi dapat bekerja sama dalam membangun Desa Sitarjo yang tangguh.
6. Dalam perbaikan program PDPT sendiri diharapkan KKP selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berjalannya program.
7. KKP selaku pembuat program PDPT diharapkan juga memberikan monitoring dan evaluasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan program sehingga tujuan PDPT dapat dicapai dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambariyanto dan Denny. 2012. Kajian Pengembangan Desa Pesisir Tangguh di Kota Semarang
- Asmoko, Hindri. Teknik Analisis Permasalahan Menentukan Masalah Prioritas. Balai Diklat Kepemimpinan. Magelang
- Azvae. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Binarupa Aksara
- Department of Economic and Social Affairs. 2014. Blue Economy. (<http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2978BEconcept.pdf>)
- Hidayat, Wahyu. 2014. Pengembangan Desa Pesisir Tangguh Kabupaten Malang. Malang Post. 03 Juni 2014
- Intiasari, Arih. 2011. Menetapkan Prioritas Masalah. (<http://kesmas-unsoed.com/2011/06/menetapkan-prioritas-masalah.html>)
- Kepner, C. H. dan Benjamin B. Tregoe. 1981. Manajer yang Rasional. Edisi Terjemahan. Erlangga. Jakarta.
- KKP. 2012. Laporan Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru.
- KKP. 2013. Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pengembangan Desa Pesisir.
- KKP, 2013. PDPT (Pengembangan Desa Pesisir Tangguh). (<http://pdpt-kkp.org/tangguh/index.php/sekilas-pdpt>).
- KKP, 2014. PDPT (Pengembangan Desa Pesisir Tangguh). (<http://pdpt-kkp.org/tangguh/index.php/sekilas-pdpt>).
- KKP. 2013. PDPT (Pengembangan Desa Pesisir Tangguh). (<http://pdpt-kkp.org/tangguh/index.php/konsep-pdpt/model-pdpt>.)
- Moloeng, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Noni et.al. 1999. Rencana Pembangunan Dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Desa Talise, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. USAID/BAPPENAS Program Pengelolaan Sumberdaya Alam. Jakarta
- Pauli, Gaunter. 2010. The Blue Economy, 10 years, 100 innovations, 100 million jobs. Report to the club of Rome. Paradigm. Publications. Taos. New Mexico. 2010.
- Penyuluhan. 2014. Ekonomi Biru.



<http://mediapenyuluhanperikananpati.blogspot.com/2014/03/blue-ekonomi-memberi-manfaat-ekonomi.html>)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Prayitno et.al. 2000. Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. USAID/BAPENAS Progrsm Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Jakarta

Riniwati. 2013. Model pemberdayaan Sumber daya Manusi (SDM) Ekonomi Biru (*Blue Economy*) di Pesisir Malang Selatan. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya.

Singarimbun dan Effendi. 1989. Metode Penelitian Survai. LP3ES. Jakarta

Sitiarjo. 2014. Data Profil Desa 2014 Desa Sitiarjo. Balai Desa Sitiarjo

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Lampiran 1. Daftar Responden terhadap lembaga yang dipilih

Ranking/ Lembaga	Rangking 1	Ranking 2	Ranking 3	Ranking 4	Ranking 5
<b>Komunitas Gereja</b>	R(1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40)	R(4, 11, 12, 17, 20, 21, 22)	R 19	R5	
<b>RT/RW</b>	R (17, 20, 22)	R (1, 6, 8, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)	R (2, 7, 9, 10, 12, 13, 27, 30)	R (19, 21, 24)	R(5, 28)
<b>Pemerintah Desa</b>		R (2, 7, 9, 10, 13, 27, 30)	R (1, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 34, 35, 36)	R (12, 22, 38, 40)	R (19, 24, 31, 32, 33)
<b>Kelompok Tani</b>	R 5	R (24, 28)	R (6, 22, 29, 31, 32)	R (2, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 27, 33, 34, 35, 36, 39)	R (7, 10, 25, 38, 40)
<b>HIPPA</b>		R 5	R (24, 28, 33)	R (3, 6, 29, 31, 32)	R (2, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 27, 34, 35, 36, 39)
<b>GAPOKTAN SAR Koperasi POKMASWAS</b>	R (11, 12)	R 18 R 3	R 5 R (38, 40) R (18, 37)	R 28 R (1, 7, 10, 30)	R (6, 29) R (3, 37)
<b>Kelompok Nelayan Pedagang Ikan PKK</b>	R 4		R 3 R 4 R 11	R 18 R (13, 20, 25, 37) R 26	R (1, 30) R 18
<b>BPD LPMD TK/RA SD/MI SLTP SLTA</b>	R (19, 21)				R 21 R (12, 26)
<b>Komunitas Masjid Koperasi Wanita</b>	R (35, 36)		R 39		R (4, 13, 20)



**Lampiran 2.** Kuisisioner Penelitian

Nama :  
 Umur :  
 Pekerjaan :

VARIABEL : Jumlah Angka Kemiskinan

No	Pertanyaan	Jawaban	Keterangan
1	Berapa pendapatan Rumah Tangga total sehari?		
2	Apakah Bapak/Ibu mempunyai waktu yang cukup setiap hari dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing?	1) Ya 2) Tidak	
3	Apakah seluruh anggota keluarga mampu makan 2 kali sehari ?	1) Sangat Setuju, 2) Setuju 3) Cukup Setuju 4) Tidak Setuju 5) Sangat Tidak Setuju	
4	Apakah seluruh anggota keluarga tidak mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, sekolah dan berpergian?	1) Sangat Setuju, 2) Setuju 3) Cukup Setuju 4) Tidak Setuju 5) Sangat Tidak Setuju	
5	Bagian terluas rumah Bapak/Ibu terdiri atas tanah	1) Ya 2) Tidak	
6	Bapak/Ibu jika anggota keluarganya sakit maka?	1) Dibawa ke puskesmas 2) Dibawa ke Bidan 3) Dibawa ke dukun, Mantri Kesehatan 4) Ke dokter spesialis 5) Alternatif lainnya	
7	Tingkat akses pelayanan kesehatan pemerintah Tinggi	1) Sangat Setuju, 2) Setuju 3) Cukup Setuju 4) Tidak Setuju 5) Sangat Tidak Setuju	
8	Apakah ada anggota keluarga yang putus sekolah?	1) Ya 2) Tidak	
9	Frekuensi makan makanan pokok per hari kurang dari dua kali	1) Sangat Setuju, 2) Setuju 3) Cukup Setuju 4) Tidak Setuju 5) Sangat Tidak Setuju	
10	Kepala keluarga mengalami PHK?	1) Ada	

11	Apakah pendapatan per bulan maksimal Rp. 132.000?	2) Tidak 1) Ya 2) Tidak	
----	---	-------------------------------	--

VARIABEL : Kemandirian Organisasi Sosial dalam Focus Group Discussion (FGD)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Ada lembaga sosial apa saja di masing-masing desa? (NAMA LEMBAGA)	
2	Bagaimana otoritas satuan sosial ? (Tanggung jawab organisasi)	
3	Bagaimana kemampuan atau validitas organisasi?	
4	Bagimana kesadaran demokrasi dalam organisasi?	
5	Aestatis ( makna original, harmonis, moral)	
6	Widom (bijak) (memahami kesamaan dan perbedaan sesama anggota)	
7	Didnity (harkat)	
8	Pride (martabat)	
9	Excellence (rasa unggul)	
10	Jiwa kewirausahaan (percaya diri, pengambilan resiko, kepemimpinan oorientasi tugas, orientasi masa depan)	

**Catatan : jumlah tergantung banyaknya lembaga atau organisasi di masing-masing desa**

VARIABEL : Kedekatan Lembaga dengan Masyarakat Desa PDPT

Focus Group Discussion (FGD) : Responden akan merangking lembaga atau organisasi yang dianggap paling dekat sama paling jauh dengan masyarakat

No	Lembaga/ Organisasi	Rangking
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

VARIABEL : MEMAHAMI KOMUNITAS

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Budaya dan tradisi komunitas	
2	Sumberdaya yang terkandung	
3	Infrastruktur yang ada	
4	Status sosial dan ekonomi warga	
5	Kebutuhan dan keinginannya	

**Catatan : jumlah data sesuai dengan jumlah komunitas di desa PDPT**









